

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian akan menjelaskan penggambaran singkat tentang profil dua situs berita daring di Indonesia dan pembahasan utama penelitian, yakni Kompas.com dan Republika.co.id.

#### 4.1.1. Profil Perusahaan Kompas.com



Gambar 4. 1 Logo Kompas.com (Website Kompas.com, 2024)

Kompas ialah perusahaan *online* media yang didirikan 14 September 1995 yang menggunakan asal nama Kompas.com. Tujuan Kompas.com adalah menyediakan layanan bagi konsumen harian Kompas pada daerah yang terperosok jejaring alokasi Kompas. Konsumen Kompas, khususnya wilayah timur dari Indonesia serta luar Indonesia, untuk bisa mengaksesnya dalam satu hari yang sama dan tidak perlu memakan waktu lama, seperti sebelumnya dengan kehadiran Kompas *Online*. URL Kompas *Online* melakukan perubahan menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com) sejak awal tahun 1996. Para khalayak yang berlangganan harian Kompas di luar negeri semakin tertarik pada Kompas *Online* setelah beralih ke URL baru (Kompas.com, 2024).

Pada 29 Mei 2008, Kompas melakukan perubahan domainnya dan menjadikannya sebagai Kompas.com. Tujuannya adalah untuk kembali menggambarkan identitas perusahaan yang terkenal dengan penyajian jurnalisme yang relevan. Media berita yang terus menambah konten. Kompas.com terus meningkatkan produksi beritanya untuk memberikan berita terbaru dan terkini

kepada pembaca. Perubahan merek Kompas.com bertujuan untuk menegaskan bahwa proses susunan berita ini dengan mengutamakan pembaca sebagai patokan *jurnalisme* berkualitas di tengah ketidakjelasan informasi dalam fenomena berita (Kompas.com, 2024).

#### 4.1.2 Profil Perusahaan Republika.co.id



Gambar 4. 2 Logo Republika.co.id (Website Republika.co.id, 2024)

Republika hadir pada pertama kali menjadi media massa cetak yaitu berbentuk koran nasional. Pada tahun 1993 Republika didirikan dan menjadi surat kabar Muslim yang bergabung Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), itu dibuat dari yayasan Abdi Bangsa yang dipelopori B.J. Habibie. Mahaka Media kemudian membeli saham Republika. Media Republika memiliki tujuan untuk menjadi wadah yang mewadahi keinginan komunitas muslim dalam konteks wacana nasional dan disampaikan kepada masyarakat melalui pluralisme informasi (Simarmata, 2014).

Harian Republika terus berkembang dengan cepat, dan pada 17 Agustus 1965, ia resmi memulai *jurnalisme* versi *online*, [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). Republika Online (ROL) adalah situs berita yang menyiarkan beragam informasi dalam format teks, audio, serta video, menggunakan teknologi hiperteks serta hipermedia . Dengan perkembangan teknologi informasi serta sosial media, Republika.co.id saat ini memiliki beragam fasilitas terbaru yang di mana adalah kombinasi komunikasi media digital. Ini adalah portal berita yang dapat diandalkan dengan informasi yang diperbarui secara teratur yang disajikan melalui berbagai kanal (Adryamarthanino & Ningsih, 2022).

## 4.2. Hasil dan Analisis Penelitian

### 4.2.1. Analisis *Framing* Berita Kompas.com

#### A. Analisis *Framing* Berita 1

**Judul** : Jokowi MengakuNetral tetapi Kerap Lempar Kode untuk Capres Tertentu, Moeldoko: Tergantung yangArtikan.

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 09 November 2023

**Ringkasan** : Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan merespons perihal penegasan Presiden Joko Widodo yang menyatakan dirinya netral, namun kerap melemparkan kode bakal capres tertentu dalam pemilihan umum 2024. Dia juga mengatakan bahwa presiden tetap akan netral dalam pemilihan umum kali ini. Dan persoalan kode itu, tergantung dengan pada pihak yang mengartikan.

Tabel 4. 1 Analisis Artikel Berita 1

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	“Jokowi MengakuNetral tetapi Kerap Lempar Kode untuk Capres Tertentu, Moeldoko: Tergantung yang Artikan”
	<b>Lead</b>	Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara konsisten menegaskan netralitasnya dalam Pemilu, namun juga sering memberikan kode tentang calon presiden yang tertentu.
	<b>Latar Informasi</b>	Presiden Jokowi tidak hanya sekali menyampaikan tentang netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 di setiap acara, sementara ia juga kerap melempar kode tentang capres tertentu.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Moeldoko (Kepala Kantor Staf Kepresidenan): <ol style="list-style-type: none"><li>1. “Ya, jawab Beliau, karena memang Beliau kadang suka begitu. Mungkin juga begitu saat pertemuan Projo di Magelang. Itu benar—simbol selalu muncul. Waktu di Magelang sudah berlalu.”</li><li>2. “Ya, tergantung pada orang yang mengartikannya,”</li><li>3. “Selama ini, saya sudah beberapa kali berkomunikasi dengan beliau dan melaporkan bahwa saya bersikap netral dalam pemilu kali ini,”</li><li>4. “Presiden selalu menyatakan posisinya seperti itu, jadi tolong pahami ini dengan benar. Jika Anda tidak memahaminya, itu akan selalu menunjukkan bahwa pemerintah atau presiden tidak netral.”</li><li>5. Moeldoko mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sering berdiskusi dengan dirinya dalam membahas soal netralitas.</li></ol> Joko Widodo (Presiden RI): <ol style="list-style-type: none"><li>1. “Oleh karena itu, saya sering mengatakan bahwa mulai tahun 2024, 2029, dan 2034 akan menjadi penentu penting bagi kemajuan Indonesia.”</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. “Pencak silat benar yang ditampilkan tadi adalah ketuanya Pak Prabowo dan sekjenjnya Pak Teddy,”</li> <li>3. “LDII sangat pintar dalam hal ini. Memberi simbol seperti itu,”</li> <li>4. Jokowi mengatakan, untuk masyarakat, tanpa terkecuali LDII tetap semangat untuk membangun bangsa.</li> <li>5. Lanjut Jokowi, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia menjadi salah satu tantangan global.</li> <li>6. Jokowi bilang, saat dunia baru menyelesaikan tantangan ekonomi, lanjut dengan tantangan baru lainnya.</li> <li>7. Kendati demikian, sambung dia. LDII pintar mempergunakan simbol – simbol.</li> <li>8. Menurut Jokowi, pemimpin dengan ciri tersebut menunjukkan bahwa orang itu memikirkan rakyatnya.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baru-baru ini, setelah membahas pentingnya kepemimpinan yang kuat untuk Indonesia, Presiden Jokowi menyebutkan nama Prabowo Subianto.</li> <li>2. Secara tiba-tiba, Presiden menyebut tentang pencak silat dan menyebut nama Prabowo Subianto.</li> <li>3. Sementara Presiden Jokowi menyampaikan pidato, saat itu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga turut hadir dalam acara tersebut.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel berita ini ditutup dengan sebuah kutipan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan menanggapi persoalan Jokowi yang mengaku netral namun sering memberikan isyarat tersirat untuk calon presiden tertentu.
	<b>Where</b>	Gedung Bina Graha, Jakarta
	<b>When</b>	9 November 2023
	<b>Who</b>	Moeldoko (Kepala Kantor Staf Kepresidenan) dan Joko Widodo (Presiden RI)
	<b>Why</b>	Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya netral pada pemilihan umum 2024, namun kerap memberi kode tentang capres tertentu.
	<b>How</b>	Presiden kerap menyinggung nama salah satu kandidat pilpres yakni Prabowo Subianto yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat untuk Indonesia pada acara Rakernas Lembaga Dakwah Islam (LDII) (7/11/2023). Kemudian, Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa dirinya netral dalam pemilihan umum kali ini. Moeldoko juga memberi pernyataan tambahan dari hasil diskusinya bersama presiden yang mengaku sama – sama netral pada pemilihan umum 2024.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel berita ini membahas persoalan tanggapan Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang menganggap dirinya netral meski kerap memberikan kode terkait capres tertentu. Penulis menyampaikan fakta terkait hasil diskusi Moeldoko dengan Jokowi yang mengaku netral pada pemilu kali ini. Pernyataan dalam berita ini berasal dari kutipan wawancara Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan. Penulis juga menyematkan informasi terkait Presiden Joko Widodo yang kerap melempar kode terkait capres tertentu.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	<p>Penggunaan kata “simbol – simbol” atau “lempar kode” frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa pesan tersirat Presiden Joko Widodo terkait kandidat capres tertentu yang ideal untuk memimpin rakyat.</p> <p>Unsur koherensi dalam teks ini ditunjukkan dengan penggunaan kata ganti “Beliau”, yang merujuk pada Presiden Joko Widodo.</p> <p>Penulis juga menegaskan pernyataan sumber “tergantung</p>

---

pada orang yang mengartikannya” hal ini bertujuan untuk menegaskan pernyataan Moeldoko terkait sikap netral Presiden Joko Widodo dan dirinya.

Foto yang digunakan dalam artikel berita ini adalah Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang diwawancarai oleh wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto yang digunakan ini memperkenalkan tokoh yang relevansi dengan judul berita guna menarik perhatian pembaca.

---

*Sumber: Olahan Peneliti, 2024*

## **Rincian Analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Teruntuk struktur ini pada berita tersebut, jika melihat melalui headline beritanya terlihat upaya penulis ingin menyampaikan terkait respons Moeldoko yang menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang menyatakan netral pada Pemilu 2024 meski sering lempar kode. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com menggambarkan tanggapan Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang secara konsisten menegaskan netralitasnya dalam Pemilu 2024. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Presiden Jokowi tidak hanya sekali menyampaikan tentang netralitasnya dalam pemilihan umum 2024 di setiap acara, sementara ia juga kerap melempar kode tentang capres tertentu. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan Presiden Joko Widodo. Artikel berita ini ditutup dengan sebuah kutipan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, menyoroti fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan dari sumber yang menjelaskan respons Moeldoko terhadap sikap Presiden Jokowi.

### **2. Struktur Skrip**

Sedangkan struktur skrip artikel tersebut, dapat dilihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan menanggapi persoalan Jokowi yang mengaku netral namun sering memberikan

isyarat tersirat untuk calon presiden tertentu, menurutnya pernyataan itu tergantung yang mengartikan.

### 3. Struktur Tematik

Ketiga yaitu struktur tematik berita, jurnalis menyiarkan fakta dengan mendeskripsikan pada awal paragraf membahas tentang tanggapan Moeldoko terkait netralitas Presiden Jokowi dan alasan simbol – simbol yang diberikan tersebut tergantung pihak yang mengartikan. Lalu, pada paragraf menengah isi pemberitaan mengenai pernyataan tambahan dari Moeldoko bahwa hasil diskusinya dirinya bersama presiden yang menegaskan sama – sama netral pada pemilihan umum 2024. Dan akhir pembahasan berupa penjelasan dari Presiden Jokowi terkait simbol – simbol yang dia sebutkan tentang ciri – ciri pemimpin Indonesia di masa yang akan datang.

### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang diwawancarai oleh wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan. Foto yang digunakan ini memperkenalkan tokoh yang relevansi dengan judul berita guna menarik perhatian pembaca. Penggunaan kata “simbol – simbol” frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa pesan tersirat dari Presiden Joko. Unsur koherensi dalam teks ini ditunjukkan dengan penggunaan kata ganti “Beliau”, yang merujuk pada Presiden Joko Widodo. Penulis juga menegaskan pernyataan sumber “tergantung pada orang yang mengartikannya” hal ini bertujuan untuk menegaskan pernyataan Moeldoko terkait sikap netral Presiden Joko Widodo dan dirinya.

## B. Analisis *Framing* Berita 2

<b>Judul</b>	: Jokowi Diwanti-wanti untuk Netral di Pilpres jika Ingin Tinggalkan "Legacy" Baik
<b>Sumber</b>	: Kompas.com
<b>Tanggal</b>	: 02 November 2023

**Ringkasan** : Putranya Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menyalonkan untuk menjadi kandidat calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik, Ujang Komarudin, menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sudah diberitahukan untuk tetap netral dalam Pilpres 2024. Kemudian, informasi pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan dirinya mendukung seluruh pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2024. Terakhir, informasi tambahan mengenai tiga pasangan capres-cawapres akan bersaing dalam pemilihan presiden 2024 yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Tabel 4. 2 Analisis Artikel Berita 2

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Jokowi Diwanti-wanti untuk Netral di Pilpres jika Ingin Tinggalkan "Legacy" Baik
	<b>Lead</b>	Presiden Joko Widodo diingatkan untuk tetap bersikap netral dalam Pilpres 2024, meskipun putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju.
	<b>Latar Informasi</b>	Gibran Rakabuming Raka, Putra Presiden Joko Widodo mencalonkan diri sebagai bakal cawapres Pilpres 2024. Hal ini memicu persoalan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024. Ujang Komarudin selaku pengamat politik, mewanti Presiden Jokowi untuk netral pada Pemilu 2024.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Ujang Komarudin (pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Jokowi harus tetap netral karena dia sosok negarawan dan ingin meninggalkan legacy yang baik,"</li> <li>2. "Ya, ini memang tantangan bagi Jokowi. Karena sebagai presiden, kepalanegara, dan kepalapemerintahan, bahwa ia memang harus bisa menjaga netralitas dan juga tidak memihak."</li> <li>3. Ujang mengatakan bahwa penting bagi semua pihak untuk waspada agar tidak terjadi intervensi yang melibatkan penggunaan aparat pemerintahan dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon.</li> <li>4. "Masalah netralitas dapat kita lihat di masa mendatang, dan kita bisa mengamati bersama langkah-langkah yang diambil Jokowi ke depannya."</li> </ol> Presiden Joko Widodo : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Dukung semuanya, untuk kebaikan negara ini,"</li> <li>2. "Cawe-cawe itu kan telah saya katakan bahwa saya menjadi kewajiban moral dan tanggungjawab moral saya selaku presiden dalam proses masa transisi kepemimpinan nasional yang akan dimulai pada tahun 2024,"</li> <li>3. "Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak ikut campur urusan capres atau cawapres,"</li> </ol>
<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Namun, bagi mantan Wali Kota Surakarta tersebut, sulit untuk tidak memberikan dukungan kepada putranya sendiri yang juga ikut berkompetisi.</li> <li>2. Sebagai pemimpin negara, Jokowi seharusnya memastikan bahwa semua jajarannya, termasuk ASN</li> </ol>	

		dan TNI-Polri, tetap netral.
<b>Skrip</b>	<b>Penutup</b>	Artikel berita ini ditutup oleh informasi tambahan terkait kandidat pasangan capres – cawapres pada Pilpres 2024.
	<b>What</b>	Ujang Komarudin menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo yang putranya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat cawapres pada Pilpres 2024.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	Berita dipublikasi pada 02 November 2023, pernyataan Ujang Komarudin pada 01 November 2023.
	<b>Who</b>	Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia.
	<b>Why</b>	Majunya putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres, yang mendampingi bakal capres Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju memicu kekhawatiran terhadap netralitas Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara.
<b>Tematik</b>	<b>How</b>	Menyoroti hal tersebut, Ujang Komarudin selaku pengamat politik meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dan tidak mendukung putranya dalam Pilpres 2024. Ujang berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan untuk bisa meninggalkan <i>legacy</i> yang baik.
	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Pada paragraf awal artikel berita ini fokus menyampaikan pernyataan Ujang Komarudin yang menanggapi sikap Presiden Jokowi sebagai kepala negara pada Pilpres 2024. Setelah itu penyampaian informasi pernyataan Presiden terkait cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian penyampaian informasi mengenai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik</b>	<b>Idiom,</b> Terdapat kata “Pengakuan Jokowi turut menjadi cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk kepentingan negara dan bangsa” frasa ini menekankan bahwa Jokowi ikut serta membantu/menangani penyelenggaraan Pemilu 2024. Terdapat foto Presiden Jokowi yang sedang berpidato, foto tersebut untuk menekankan judul yang digunakan pada artikel berita ini.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis berita tersebut, jika dilihat dari judul beritanya terlihat upaya penulis ingin menyampaikan terkait pernyataan Ujang Komarudin terhadap sikap Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Jika dilihat dari bagian *lead* beritanya, Kompas.com menekankan informasi mengenai Presiden Joko Widodo diberi peringatan untuk tetap mempertahankan sikap netral dalam Pilpres 2024, meskipun anak dari presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyalonkan diri menjadi kandidat cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Gibran Rakabuming Raka, Putra Presiden Joko Widodo maju sebagai bakal cawapres Pilpres 2024. Hal ini memicu persoalan netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024.

Ujang Komarudin, seorang ahli politik, mewanti Presiden Jokowi untuk netral pada Pemilu 2024. Hal tersebut didukung oleh kutipan narasumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni Ujang Komarudin, seorang ahli politik dari Universitas Al Azhar Indonesia dan Presiden Joko Widodo. Artikel berita tersebut dikahiri dengan informasi tambahan mengenai kandidat pasangan capres – cawapres pada Pilpres 2024. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari judul, *lead*, latar informasi, serta kutipan dari sumber yang memberitahukan respons Ujang Komarudin terhadap sikap Presiden Joko Widodo tersebut.

## **2. Struktur Skrip**

Sedangkan struktur skrip artikel berita tersebut, terlihat penulis telah memenuhi berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Ujang Komarudin menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo yang putranya, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai kandidat cawapres pada Pilpres 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Dalam struktur Tematik artikel berita tersebut, terlihat penulis menuliskan fakta dengan cara menjelaskan pada awal paragraf membahas tentang pernyataan Ujang Komarudin yang menanggapi sikap Presiden Jokowi sebagai kepala negara pada Pilpres 2024. Setelah itu penyampaian informasi pernyataan Presiden terkait cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian penyampaian informasi mengenai pasangan capres-cawapres Pilpres 2024.

## **4. Struktur Retoris**

Penggunaan foto pada artikel berita ini adalah Presiden Jokowi yang sedang berpidato, foto itu untuk menekankan judul yang dipakai pada artikel berita ini. Dalam isi artikel berita ini terdapat kata “Presiden Joko Widodo yang sudah diberitahukan untuk tetap netral pada Pilpres 2024” frasa ini

menekankan pesan yang diberikan dengan sungguh-sungguhnya supaya dapat terlaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kemudian, terdapat kata “Pengakuan Jokowi turut menjadi cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk kepentingan negara dan bangsa” frasa ini menekankan bahwa Jokowi ikut serta membantu/menangani penyelenggaraan Pemilu 2024.

### C. Analisis Framing Berita 3

**Judul** : Ingatkan Aparat Negara Tak Memihak, SBY: Bisa Kok Menang Pemilu Sambil Jaga Netralitas

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 01 Desember 2023

**Ringkasan** : Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat memberikan peringatan kepada pejabat negara untuk tidak berpihak dengan kelompok tertentu pada pemilihan umum 2024. Hal ini untuk menciptakan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis. Selain itu, SBY juga menghimbau masyarakat agar ikut serta mengawasi pemilu dan mengawal netralitas para aparat negara.

Tabel 4. 3 Analisis Artikel Berita 3

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Ingatkan Aparat Negara Tak Memihak, SBY: Bisa Kok Menang Pemilu Sambil Jaga Netralitas
	<b>Lead</b>	Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengingatkan untuk para pejabat negara agar menghindari sikap memihak pada kelompok tertentu semasa pemilihan umum 2024.
	<b>Latar Informasi</b>	SBY mengatakan kepada seluruh aparat negara untuk bersikap netral dalam mewujudkan suasana pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Susilo Bambang Yudhoyono (Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “bagi saya pemilihan kali ini berbeda dari sebelumnya, terlihat bahwa persaingannya semakin ketat dan sengit”,</li> <li>2. SBY menyebutkan, untuk para aparat negara memang diharuskan bersikap netral agar terwujud pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis.</li> <li>3. “Semua orang harus bertanggung jawab atas menjaga pemilu yang damai. Pemerintah dan presiden memiliki tanggung jawab, begitu pula dengan partai politik. Calon legislatif, kandidat presiden, dan calon wakil presiden juga memiliki tanggung jawab yang sama”,</li> <li>4. Lanjut SBY, menilai bahwa netralitas aparat negara sangat penting untuk pemilu yang jujur, adil, dan</li> </ol>

		demokratis.
		5. Menurut SBY, masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi pemilu beserta mengawal jalannya netralitas aparat negara.
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Ia menginginkan agar rakyat tidak mengalami kerugian karena proses pemilihan yang tidak bertanggung jawab.
	<b>Penutup</b>	Pemberitaan ditutup dengan penjelasan mengenai tahapan pemilihan umum 2024 mulai dari waktu masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, memberikan peringatan kepada pejabat negara untuk bersikap netral di Pemilu 2024.
	<b>Where</b>	Cirebon, Jawa Barat
	<b>When</b>	30 November 2023
	<b>Who</b>	Susilo Bambang Yudhoyono
	<b>Why</b>	SBY menilai bahwa netralitas aparat negara penting dalam pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis.
	<b>How</b>	Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, meminta pada semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung dengan aman dan damai.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel berita ini membahas pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam meminta aparat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Penulis menyampaikan fakta terkait bahwa netralitas aparat negara penting dalam pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis. Pernyataan pada teks berita ini bersumber dari kutipan wawancara SBY. Penulis juga memasukan informasi terkait tahapan pemilihan umum 2024 mulai dari waktu masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Susilo Bambang Yudhoyono hadir di lomba pembukaan Proliga 2023 untuk Jakarta BNI 46. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca. Terdapat beberapa unsur koherensi yang menekankan maksud tertentu, diantaranya kata ganti "Mereka" merujuk pada Polri, BIN, TNI, dan BUMN. Kemudian, unsur koherensi yaitu kata ganti "Ia" yang diartikan yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu unsur koherensi yakni kata ganti "Netral" merujuk pada kondisi tidak memihak salah satu pihak.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, jika diperlihatkan di *headline* beritanya terlihat upaya perusahaan ingin menyampaikan terkait pernyataan SBY pentingnya netralitas aparat negara pada pemilihan umum 2024. SBY menjelaskan sikap netral aparat negara menjadi kunci untuk menciptakan pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com

menonjolkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan untuk para pejabat negara agar menghindari sikap memihak pada kelompok tertentu semasa pemilihan umum 2024. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi dan didukung oleh kutipan sumber berita ini yaitu terkait pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang mengatakan terhadap seluruh aparat negara untuk bersikap netral dalam mewujudkan suasana pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis. Lalu, artikel ditutup dengan penjelasan mengenai tahapan pemilihan umum 2024 mulai dari waktu masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Berdasarkan elemen – elemen pada struktur sintaksis ini, penulis mengutamakan fakta dari headline, *lead*, serta kutipan informan yang memberikan informasi pernyataan SBY dalam membangun sikap netral untuk para aparat negara dalam Pemilu 2024.

## **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip artikel tersebut, dilihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan peringatan untuk pejabat negara untuk bersikap netral di Pemilu 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Dari struktur tematik berita artikel tersebut, bahwa artikel berita ini membahas pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam memberikan perintah aparat negara untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024. Penulis menyampaikan fakta terkait bahwa netralitas aparat negara penting dalam pesta demokrasi yang jujur, adil, dan demokratis. Pernyataan tersebut bersumber dari kutipan wawancara oleh SBY. Penulis juga memasukan informasi terkait tahapan pemilihan umum 2024 mulai dari waktu masa kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Susilo Bambang Yudhoyono hadir di lomba pembukaan Proliga 2023 untuk Jakarta BNI 46. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca. Terdapat beberapa unsur koherensi yang menekankan maksud tertentu, diantaranya kata ganti “Mereka” merujuk pada Polri, BIN, TNI, dan BUMN. Kemudian, unsur koherensi yaitu kata ganti “Ia” yang diartikan yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu unsur koherensi yakni kata ganti “Netral” merujuk pada kondisi tidak memihak salah satu pihak.

#### D. Analisis *Framing* Berita 4

- Judul** : Ma’rufAmin Mengaku Netral, TakAkan "Endorse" Capres-Cawapres Pemilu 2024
- Sumber** : Kompas.com
- Tanggal** : 28 Desember 2023
- Ringkasan** : Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa dia tidak akan memperlihatkan ketidaknetralan terhadap capres dan cawapres tertentu selama pemilihan umum 2024. Ma'ruf menegaskan, dirinya tidak akan memberi ‘endorse’ capres dan cawapres manapun.

Tabel 4. 4 Analisis Artikel Berita 4

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Ma’rufAmin Mengaku Netral, TakAkan "Endorse" Capres-Cawapres Pemilu 2024
	<b>Lead</b>	Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa dia tidak akan menunjukkan keberpihakannya kepada calon presiden dan calon wakil presiden tertentu selama pemilihan umum 2024 pada 28 Desember 2023.
	<b>Latar Informasi</b>	Ma’ruf Amin memberikan pernyataan bahwa akan netral pada Pemilu 2024 dan tidak memberi ‘Endorse’ kepada pihak manapun.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Ma’ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia): 1. “Saya harus tetap netral ketika berbicara di depan publik. Saya memiliki pilihan pribadi, dan itu hanya akan saya ungkapkan di tempat yang tepat,” 2. Ma’ruf berkata, bahwa kelak dirinya yang hanya mengetahui pilihan capres – cawapres dan akan

		<p>mencolok suara pada saat waktu pemilihan yakni 14 Februari 2024.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. “Itu adalah masalah yang sangat pribadi, jadi saya hanya membahasnya di bilik suara. Saya bersikap netral di depan publik,”</li> <li>4. “Menurut saya, ukurannya secara umum, harus dibandingkan, dan kemudian memutuskan mana yang terbaik. Pastinya saya tidak akan pergi ke sana, karena itu akan membuat saya kehilangan netralitas,”</li> <li>5. “Karena mereka sudah memiliki ukuran sendiri. Pasti yang terbaik saya rasa,”</li> <li>6. Ma’ruf bilang, ia memberi kebebasan pada anggota keluarganya dalam menentukan pilihan. Ia berharap, anggota keluarganya dapat memilih pilihan yang terbaik.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	-
<b>Skrip</b>	<p><b>What</b></p> <p><b>Where</b></p> <p><b>When</b></p> <p><b>Who</b></p> <p><b>Why</b></p> <p><b>How</b></p>	<p>Artikel berita ini ditutup dengan penjelasan berlangsungnya kampanye pemilihan 2024, masa tenang dan informasi mengenai pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia.</p> <p>Ma’ruf Amin menegaskan dirinya netral dalam Pemilu 2024.</p> <p>Program Satu Meja Kompas TV</p> <p>28 Desember 2023</p> <p>Ma’ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia</p> <p>Ma’ruf mengaku tidak akan berpihak kepada capres – cawapres tertentu dalam Pemilu 2024 dan mengaku tidak memberi ‘<i>Endorse</i>’ kepada pihak manapun.</p> <p>Ma’ruf menyatakan bahwa dirinya menjaga netralitas dalam Pemilu 2024 sebab hanya dirinya yang tahu pilihannya dan akan dituang di bilik suara pada hari H pemilihan yaitu 14 Februari 2024. Selain itu, Ma’ruf berpesan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang kriteria terbaik.</p>
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	<p>Pada artikel berita ini membahas pernyataan Ma’ruf Amin selaku Wakil Presiden RI yang menegaskan akan netral dalam Pemilu 2024 serta menegaskan tidak akan memberikan ‘<i>Endorse</i>’ kepada pihak manapun. Penulis menggunakan kutipan sumber dari Ma’ruf Amin. Setelah itu, penulis juga menyampaikan penjelasan penjelasan berlangsungnya kampanye pemilihan 2024, masa tenang dan informasi mengenai pemungutan suara.</p>
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	<p>Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Ma’ruf Amin yang sedang mengisi acara di Sumenep, Jawa Timur. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca.</p> <p>Terdapat beberapa unsur koherensi yang menekankan maksud tertentu, diantaranya yaitu kata ganti “<i>Endorse</i>” yang dimaksud yaitu mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 manapun</p> <p>Terdapat aspek koherensi yakni kata ganti “<i>Ia</i>” yang diartikan yakni Ma’ruf Amin.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Dari struktur sintaksis, jika melihat melalui headline beritanya terlihat upaya jurnalis berusaha mengutarakan terkait pernyataan Ma’ruf Amin yang

akan bersikap netral pada Pemilu 2024. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com menggambarkan pernyataan Ma'ruf Amin, menjelaskan bahwa dia tidak akan memperlihatkan ketidaknetralan terhadap capres dan cawapres tertentu selama pemilihan umum 2024 di 28 Desember 2023. *Lead* berita mengutamakan mengenai background informasi isi artikel tersebut. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni dari Ma'ruf Amin. Artikel ini ditutup dengan penjelasan berlangsungnya kampanye pemilihan 2024, masa tenang dan informasi mengenai pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengeaskan fakta dari *headline*, *lead*, latar informasi serta sitasi dari sumber mengutamakan respons Ma'ruf Amin mengenai kesiapannya dalam bersikap netral di Pemilu 2024.

## **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip berita artikel tersebut, terlihat penulis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Ma'ruf Amin menegaskan dirinya netral dalam Pemilu 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Dalam struktur tematik artikel tersebut, artikel berita membahas pernyataan Ma'ruf Amin yang merupakan Wakil Presiden RI yang menegaskan akan netral dalam Pemilu 2024 serta menegaskan tidak akan memberikan '*Endorse*' kepada pihak manapun. Penulis menggunakan kutipan sumber dari Ma'ruf Amin. Setelah itu, penulis juga menyampaikan penjelasan penjelasan berlangsungnya kampanye pemilihan 2024, masa tenang dan informasi mengenai pemungutan suara.

## **4. Struktur Retoris**

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Ma'ruf Amin yang sedang mengisi acara di Sumenep, Jawa Timur. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca. Kemudian, terdapat beberapa unsur koherensi yang menekankan maksud tertentu, diantaranya yaitu kata ganti “*Endorse*” yang dimaksud yaitu mendukung Capres-Cawapres Pemilu 2024 manapun. Kemudian, aspek koherensi yakni kata ganti “*Ia*” yang diartikan yakni Ma'ruf Amin.

#### E. Analisis Framing Berita 5

**Judul** : Netralitas Dipertanyakan karena MakanBareng Prabowo, Jokowi: KetemunyaKan Malam Hari

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 08 Januari 2024

**Ringkasan** : Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan tentang dirinya yang netral pada pemilihan presiden 2024 dan mengadakan makan malam bersama Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, dan beberapa ketua umum dari parpol mendukung Prabowo-Gibran. Selain itu, Presiden Jokowi juga melaksanakan pertemuan dengan Airlangga Hartato dan Zulkifli Hasan. Menurut Jokowi, agenda pertemuan tersebut dalam rangka pertemuan dengan anggota kabinetnya untuk membahas baik pemerintahan dan pilpres.

Tabel 4. 5 Analisis Artikel Berita 5

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Netralitas Dipertanyakan karena MakanBareng Prabowo, Jokowi: KetemunyaKan Malam Hari
	<b>Lead</b>	Presiden Joko Widodo merespons pertanyaan terkait netralitasnya dalam pemilihan presiden 2024 dengan mengadakan makan malam bersama Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, serta beberapa ketua umum partai politik yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
	<b>Latar Informasi</b>	Presiden Joko Widodo melaksanakan makan makan bersama Prabowo Subianto dan beberapa ketua umum parpol tim sukses pasangan Prabowo – Gibran Rakabuming Raka
	<b>Kutipan Sumber</b>	Joko Widodo (Presiden RI): 1. Jokowi berkata, acara makan bersama Prabowo, Airlangga, Zulkifli Hasan dilakukan pada saat libur. 2. Lanjut Jokowi, pertemuan dengan ketiga tokoh tersebut untuk membahas soal pemerintahan dan juga

		soal pemilihan presiden karena ketiganya anggota Kabinet Jokowi.
		3. “Bahas pemerintahan ada, dan ada bahas pilpres juga,” Komarudin Watubun (Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan):
		1. “Sangat wajar jika banyak orang mempertanyakan pertemuan malam ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, karena pertemuan ini seolah – olah mengkonfirmasi pernyataan Menkominfo kemarin bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo,”
		2. Lanjut Komarudin, pertemuan makan malam Jokowi dan Prabowo di sebuah restoran di Menteng itu bisa membuat masyarakat bertanya – tanya.
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	-
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Artikel ini diakhiri dengan kutipan dari Komarudin Watubun yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak netral pada kontestasi pilpres ini. Jokowi menegaskan persoalan netralitas dirinya dalam Pemilu 2024.
	<b>Where</b>	Pers di Gerbang Tol Limo Utama, Kita Depok, Jawa Barat.
	<b>When</b>	Berita diterbitkan pada 08 Januari 2024 dan pernyataan Komarudin pada 5 Januari 2024.
	<b>Who</b>	Presiden Joko Widodo dan Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan
	<b>Why</b>	Presiden Jokowi melakukan pertemuan makan malam bersama Prabowo Subianto pada Jumat, 5 Januari 2024, di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat. Selain itu, ia juga melakukan pertemuan makan pagi dan makan siang dengan Airlangga dan Zulhas.
	<b>How</b>	Agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan tiga tokoh tersebut, baginya merupakan agenda pertemuan tersebut dalam rangka pertemuan dengan anggota kabinatnya untuk membahas baik pemerintahan dan pilpres.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Di awal teks berita, penulis menyampaikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait netralitas dirinya pada pemilihan presiden 2024. Penulis juga menyampaikan maksud makan malam Presiden Jokowi bersama Prabowo Subianto maupun dengan beberapa ketua parpol yakni Ailangga Hartarto dan Zulkifli Hasan dalam rangka pertemuan dengan anggota kabinatnya. Kemudian, penulis juga menyampaikan informasi tambahan yakni tanggapan Komarudin Watubun selaku Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan (PDI-P) yang mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah gambar Presiden Jokowi yang sedang makan-makan dengan Prabowo Subianto di Rumah Makan SeribuRasa, Jakarta Pusat kawasan Menteng pada 5 Januari 2024. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca. Kemudian terdapat unsur koherensi yaitu kata ganti “Wong” merujuk pada orang. Selanjutnya, Penggunaan kata “tiga tokoh” frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa seseorang yang dimaksud yaitu Prabowo, Zulhas, Airlangga.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur tersebut, jika diperlihatkan dari *headline* beritanya terlihat upaya jurnalis berupaya mengutarakan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo menanggapi tentang dirinya yang netral pada pemilihan presiden 2024 setelah melakukan pertemuan dengan Prabowo, Zulhas, dan Airlangga. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com menggambarkan tanggapan Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan tentang dirinya yang netral pada pemilihan presiden 2024 dengan mengadakan makan-makan bersama Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, dan beberapa ketua parpol mendukung Prabowo-Gibran. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Presiden Joko Widodo melaksanakan makan-makan bersama Prabowo Subianto di RM Seribu Rasa, Jakarta Pusat tepatnya Mentang pada Jumat 5 Januari 2024. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni Presiden Jokowi dan Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Artikel tersebut diakhiri dengan kutipan Komarudin Watubun yang menjelaskan jika Presiden Joko Widodo tidak netral pada kontestasi pilpres ini. g berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari *headline*, latar informan, *lead*, serta sitasi sumber yang mengutamakan respon Presiden Joko Widodo mendapatkan jawaban tentang netralitas dirinya untuk pemilihan presiden 2024.

## **2. Struktur Skrip**

Sedangkan struktur skrips artikel berita, dilihat jika jurnalis telah melengkapi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Jokowi menegaskan persoalan netralitas dirinya dalam Pemilu 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Pada struktur tematik di awal teks artikel, penulis menyampaikan pernyataan Presiden Joko Widodo terkait netralitas dirinya pada pemilihan presiden 2024. Penulis juga menyampaikan maksud makan malam Presiden

Jokowi bersama Prabowo Subianto maupun dengan beberapa ketua parpol yakni Ailangga Hartarto dan Zulkifli Hasan dalam rangka pertemuan dengan anggota kabinentnya. Kemudian, penulis juga menyampaikan informasi tambahan yakni tanggapan Komarudin Watubun selaku Ketua Bidang Kehormatan PDI-P yang bertanya-tanya sifat netral Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah gambar Presiden Jokowi yang sedang makan-makan dengan Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa, Jakarta Pusat kawasan Menteng pada 5 Januari 2024. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca. Kemudian terdapat unsur koherensi yaitu kata ganti “Wong” merujuk pada orang. Selanjutnya, Penggunaan kata “tiga tokoh” frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa seseorang yang dimaksud yaitu Prabowo, Zulhas, Airlangga.

#### F. Analisis Framing Berita 6

- Judul** : Sepakat dengan JK, Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Pak Jokowi TakMampu Jalankan PemiluDemokratis
- Sumber** : Kompas.com
- Tanggal** : 10 Januari 2024
- Ringkasan** : Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P sepakat dengan tanggapan Yusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden yang memberi masukan kepada Presiden Jokowi agar dapat bersikap netralitas dalam pemilihan umum 2024. Dirinya juga menyampaikan pesan agar Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya bisa meninggalkan warisan yang baik.

Tabel 4. 6 Analisis Artikel Berita 6

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Sepakat dengan JK, Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Pak Jokowi TakMampu Jalankan PemiluDemokratis
	<i>Lead</i>	Jusuf kalla memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk netral dalam Pemilu 2024, sebab menurutnya netralitas bagian dari integritas seorang presiden.
	<b>Latar Informasi</b>	Jusuf kalla memberi peringatan kepada Presiden Joko

		Widodo untuk netral dalam Pemilu 2024, sebab menurutnya netralitas bagian dari integritas seorang presiden. Selain itu, Hasto Kristiyanto juga berpendapat untuk Presiden Joko Widodo dapat meninggalkan <i>legacy</i> yang baik.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Hasto Kristiyanto (Sekretaris Jenderal PDI-P): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasto berkata, Presiden Jokowi yang masa jabatannya akan habis di tahun ini harus bisa meninggalkan warisan yang baik.</li> <li>2. Hasto berujar, agar Presiden Jokowi mendengar pesan dari Jusuf Kalla karena ia merupakan sosok pemimpin yang memiliki pengalaman dan tokoh kawakan.</li> <li>3. “Kami sepakat dengan pandangan Pak Jusuf Kalla dan percaya bahwa Pak Jokowi akan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak JK,”</li> </ol> Jusuf Kalla (Mantan Wakil Presiden ke-10): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalla menyebutkan bahwa netralitas adalah elemen penting dari integritas seorang presiden dan merupakan bagian dari sumpah jabatan yang diambil untuk memastikan sikap adil terhadap masyarakat.</li> <li>2. Lanjut Kalla, bahwa Jokowi harus menjadi sumpah jabatan yang sifatnya lebih tinggi dari Undang – Undang Dasar 1945.</li> <li>3. “Jadi, sebagai pejabat dan bukan hanya presiden jika tindakan yang tidak adil melanggar sumpahnya akan dikenakan sanksi, baik oleh Allah maupun UUD,”</li> </ol> -
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Yusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden yang mengatakan bahwa sumpah jabatan harus di jaga oleh Presiden Jokowi sebab jika melanggar sumpahnya dapat dikenakan sanksi, baik dari Allah maupun UUD.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P sepakat dengan pernyataan JK terkait Presiden Jokowi agar dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
	<b>Where</b>	Cilandak, Jakarta Selatan.
	<b>When</b>	Berita ini diterbitkan pada 12 Januari 2024 dan pernyataan Jusuf Kalla pada 10 Januari 2024.
	<b>Who</b>	Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P dan Yusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden.
	<b>Why</b>	Jusuf Kalla mengatakan netralitas Presiden Jokowi menjadi bagian dari integritas dan sumpah presiden dalam menjabat, untuk bersikap adil kepada seluruh masyarakat.
	<b>How</b>	JK mengungkapkan bahwa sumpah jabatan harus di jaga oleh Presiden Jokowi sebab jika melanggar sumpahnya dapat dikenakan sanksi, baik dari Allah maupun UUD. Ditambah tutur Hasto bahwa Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya harus meninggalkan warisan yang baik yakni harus dapat menjalankan pemilu yang demokratis.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Pada awal tulisan, jurnalis mencoba memberikan di awal tulisan tersebut yakni latar informasi pada tulisan berita mengenai pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P yang sepakat dengan pernyataan JK terkait Presiden Jokowi agar dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Penulis juga menyampaikan pernyataan Hasto yang berharap Presiden Jokowi dapat meninggalkan <i>legacy</i> (warisan) yang baik yakni mampu menjadi payung keadilan untuk rakyat. Serta penulis juga menyampaikan informasi tambahan mengenai pernyataan Jusuf Kalla agar Presiden Jokowi menjaga integritas dan sumpah presiden yakni bersikap adil bagi seluruh masyarakat.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Idiom, Grafik</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P didepan wartawan pada acara pernyataan kiai serta ulama perkampungan pendukung Ganjar – Mahfud di daerah Cilandak, Jakarta

---

Selatan pada 12 Januari 2024. Foto ini ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca.

Kemudian didapati terlihat menggunakan kosa kata yang bersumber dari pernyataan narasumber yakni “Tokoh kawakan” frasa ini menekankan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang sudah kawak atau sudah tua sekali.

---

*Sumber: Olahan Peneliti, 2024*

## **Rincian Analisis**

### **1. Struktur Sintaksis**

Dari struktur sintaksis, jika melihat melalui *headline* beritanya terlihat upaya jurnalis berupaya menyebarkan pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P sepakat dengan pernyataan JK terkait Presiden Jokowi agar dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com menggambarkan Jusuf Kalla memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo untuk netral dalam Pemilu 2024, sebab menurutnya netralitas bagian dari integritas seorang presiden. Selain itu, Hasto Kristiyanto juga berpendapat untuk Presiden Joko Widodo dapat meninggalkan *legacy* yang baik. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni yakni Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P dan Yusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden. Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Yusuf Kalla, Mantan Wakil Presiden yang mengatakan bahwa sumpah jabatan harus di jaga oleh Presiden Jokowi sebab jika melanggar sumpahnya dapat dikenakan sanksi, baik dari Allah maupun UUD. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada berita artikel ini, yang mengutamakan fakta dari *headline*, latar informasi, *lead*, dan kutipan sumber yang menyebarkan respons Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P yang sepakat dengan pernyataan JK terkait Presiden Jokowi agar dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

### **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip artikel tersebut, dilihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur what yaitu *what* yaitu Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P sepakat dengan pernyataan JK terkait Presiden Jokowi agar dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.

### 3. Struktur Tematik

Dari struktur tematik pada awal tulisan, jurnalis mencoba memberikan di awalan tulisan tersebut yakni latar informasi pada tulisan berita mengenai pernyataan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P yang sepakat dengan pernyataan JK terkait Presiden Jokowi agar dapat menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Penulis juga menyampaikan pernyataan Hasto yang berharap Presiden Jokowi dapat meninggalkan *legacy* (warisan) yang baik yakni mampu menjadi payung keadilan untuk rakyat. Serta penulis juga menyampaikan informasi tambahan mengenai pernyataan Jusuf Kalla agar Presiden Jokowi menjaga integritas dan sumpah presiden yakni bersikap adil bagi seluruh masyarakat.

### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P didepan wartawan pada acara pernyataan kiai serta ulama perkampungan pendukung Ganjar – Mahfud di daerah Cilandak, Jakarta Selatan pada 12 Januari 2024. Foto ini ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca. Kemudian didapati terlihat menggunakan kosa kata yang bersumber dari pernyataan narasumber yakni “Tokoh kawakan” frasa ini menekankan Jusuf Kalla merupakan salah satu tokoh yang sudah kawak atau sudah tua sekali.

## G. Analisis Framing Berita 7

**Judul** : Singgung Sikap Jokowi, Komarudin Watubun: Kan

AnaknyaCawapres, Kalau BapaknyaKampanye Itu Pertama didunia

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 24 Januari 2024

**Ringkasan** : Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P berpendapat jika Presiden Jokowi sepatutnya tidak berpartisipasi dalam kampanye saat anak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka, ikut serta menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Ia juga mengatakan hal ini dapat menimbulkan kecemasan khalayak pada praktik kolusi, korupsi, serta nepotisme (KKN).

Tabel 4. 7 Analisis Artikel Berita 7

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Singgung Sikap Jokowi, Komarudin Watubun: Kan AnaknyaCawapres, KalauBapaknya Kampanye Itu Pertama didunia
	<b>Lead</b>	Menurut Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak terlibat dalam kampanye saat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
	<b>Latar Informasi</b>	Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa seorang presiden boleh terlibat dalam kampanye dan menyatakan dukungan dalam pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara. Merespons hal tersebut, Komarudin Watubun, menanggapi bahwa Presiden Jokowi harus netral di tengah majunya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada pilpres 2024.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Komarudin Watubun (Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Ada kemungkinan bahwa anaknya akan dicalonkan sebagai wakil presiden. Oleh karena itu, jika bapaknya adalah presiden aktif, meminta anaknya untuk menjadi presiden adalah hal pertama di dunia. Ini harus dihindari,”</li> <li>2. “Saya masih ingat apa yang dikatakan Jokowi saat pelantikan. Konstitusi dan keinginan rakyat adalah satu-satunya hal yang dapat dia ikuti. Apa yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan keinginan rakyat jika tindakan seperti itu dilakukan? Itu hanya satu,”</li> <li>3. Menurut Komarudin, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kerap terjadi memicu kekhawatiran publik.</li> </ol> Joko Widodo (Presiden RI): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Hak politik, hak demokrasi setiap orang. Setiap menteri sama saja,”</li> <li>2. “Yang paling penting adalah presiden memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kampanye dan memberikan dukungan. Namun, yang paling penting adalah dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara selama kampanye. Jadi mungkin (presiden kampanye),”</li> <li>3. Menurut Jokowi, bahwa aktivitas yang dijalankan oleh para menteri dari bidang nonpolitik itu menjadi hak</li> </ol>

		demokrasi.
		4. Menurut Jokowi, seorang presiden boleh ikutserta berkampanye dalam pemilihan umum serta diperbolehkan untuk mendukung calon tertentu.
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Komarudin kemudian membahas mengenai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa.
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan informasi tambahan mengenai pernyataan yang diciptakan Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan presiden boleh berkampanye dan boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara dan terkait aktivitas kampanye yang dilakukan para menteri bidang nonpolitik itu adalah hak demokrasi setiap orang.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Komarudin Watubun menyinggung Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut berkampanye saat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres pada pilpres 2024.
	<b>Where</b>	Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta
	<b>When</b>	24 Januari 2024
	<b>Who</b>	Komarudin Watubun, Presiden Joko Widodo
	<b>Why</b>	Presiden Jokowi memberi pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Sehingga, bagi komarudin hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran publik pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
	<b>How</b>	Komarudin menyinggung Presiden Jokowi sebelumnya saat menekankan netralitas para pejabat publik dalam Pemilu 2024 dan Komarudin juga mengatakan terkait moral dan etika dalam kehidupan berbangsa perlu diperhatikan Presiden Jokowi agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Di awal teks berita ini, penulis menyampaikan latar informasi pada teks berita terkait pernyataan Komarudin Watubun yang menyinggung Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut berkampanye saat putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres pada pilpres 2024 sebab hal ini baru pertama kali terjadi di dunia. Penulis juga menyampaikan terkait moral dan etika merupakan prinsip kehidupan bernegara. Penulis juga memberikan informasi tambahan mengenai pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh berkampanye dan boleh memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara.
	<b>Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik</b>
		Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Komarudin Watubun saat berada Kantor DPP PDI-P, Jakarta. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, jika diperlihatkan pada *headline* beritanya terlihat upaya media dalam menyuarakan informasi mengenai pernyataan Komarudin Watubun menilai untuk pertama kali di dunia seorang presiden aktif ikut berkampanye salah satu kandidat calon wakil presiden yang merupakan putra sulungnya. Jika dilihat dari lead beritanya, Kompas.com menggambarkan terkait Presiden Joko Widodo memang harusnya tidak ikutserta melakukan

kampanye posisi putra pertama, Gibran Rakabuming Raka, menjadi kandidat calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2024, menurut Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa seorang presiden boleh terlibat dalam kampanye dan menyatakan dukungan dalam pemilu, selama tidak menggunakan fasilitas negara. Merespons hal tersebut, Komarudin Watubun, menanggapi bahwa Presiden Jokowi harus netral di tengah majunya anak pertama, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada pilpres 2024. Dan artikel ini ditutup dengan informasi tambahan mengenai pernyataan yang diciptakan Presiden Jokowi, dia menyatakan bahwa hak demokrasi setiap orang untuk berkampanye, bahkan jika mereka tidak menggunakan fasilitas negara. Presiden juga menyatakan bahwa menteri bidang nonpolitik memiliki hak demokrasi. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada berita artikel ini, yang mengutamakan sebuah fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan dari sumber yang mengutarakan respons Komarudin Watubun yang menilai untuk pertama kali di dunia seorang presiden aktif ikut berkampanye salah satu kandidat calon wakil presiden yang merupakan putra sulung.

## **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip berita, terlihat jurnalis menggunakan rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Komarudin Watubun menyinggung Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut dalam melaksanakan kampanye saat anak pertamanya, Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres di pilpres 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Pada struktur tematik berita tersebut, di awal tulisan penulis mengutarakan latar informasi pada teks berita mengenai pernyataan Komarudin Watubun yang menyinggung Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut melakukan

kampanye saat anak pertamanya, Gibran menjadi kandidat cawapres pada pilpres 2024 dikarenakan hal seperti ini untuk pertama kalinya terjadi. Penulis juga menyampaikan terkait moral dan etika merupakan prinsip kehidupan bernegara. Penulis juga memberikan informasi tambahan mengenai pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh melakukan kampanye dan boleh berpihak asalkan tidak mengenakan fasilitas-fasilitas negara.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Komarudin Watubun saat berada Kantor DPP PDI-P, Jakarta. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca.

#### H. Analisis Framing Berita 8

- Judul** : Pernyataan Sikap Sivitas Akademika 9 Kampus Kritisi Demokrasi Pemerintahan Jokowi
- Sumber** : Kompas.com
- Tanggal** : 03 Februari 2024
- Ringkasan** : Perwakilan akademisi dari sedikitnya kesembilan campus Indonesia berseru dalam mengkritik demokrasi pemerintah Presiden Jokowi pada 31 Januari 2024, hingga Sabtu, 24 Februari 2024.

Tabel 4. 8 Analisis Artikel Berita 8

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Pernyataan Sikap Sivitas Akademika 9 Kampus Kritisi Demokrasi Pemerintahan Jokowi
	<b>Lead</b>	Sejak Rabu, 31 Januari 2024, hingga Sabtu, 24 Februari 2024, perwakilan akademisi dari sedikitnya sembilan kampus di Indonesia ramai-ramai mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
	<b>Latar Informasi</b>	Suasana sivitas akademika yang berasal dari sembilan kampus di Indonesia yang memberikan kritik demokrasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Prof Koentjoro (Guru Besar Fakultas Psikologi): 1. Koentjoro berujar, bahwa segala penyimpangan tersebut tidak sejalan dengan adanya prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang tentu menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila. Prof Fathul Wahid (Rektor UII): 1. Fathul menyatakan bahwa situasi politik di Indonesia

		<p>saat ini semakin menunjukkan tidak adanya rasa malu dalam praktik penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Fathul mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia menghadapi krisis kepemimpinan yang dapat berdampak pada keruntuhan sistem hukum dan demokrasi.</li> </ol> <p>Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Ketua Dewan Guru Besar UI):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harkristuti berkata, merasa prihatin terhadap tatanan demokrasi di Indonesia.</li> </ol> <p>Prof Amran Razak (Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Amran menyampaikan bahwa pernyataan sikap ini dibuat agar pemerintah dapat menjaga marwah demokrasi.</li> <li>“Mengingat bahwa kami adalah pelaku reformasi demokrasi, kami akan terus memastikan bahwa reformasi dapat kembali ke jalan yang benar,”</li> </ol> <p>Hary Effendi (Penggagas Aliansi Civitas Akademika Unand):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“Kami menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan juga upaya untuk melemahkan institusi demokras,”</li> <li>Hary menyatakan bahwa pemerintah harus mengembalikan reputasi perguruan tinggi sebagai lembaga penjaga moral dan nilai yang independen, bebas dari politisasi oleh elite dan intervensi.</li> </ol> <p>Hadin Muhjad (Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menurut Hadin, pernyataan sikap tersebut mencakup perkembangan politik yang akan terjadi menjelang Pemilu 2024. Mereka berharap Pemilu 2024 akan adil dan bertanggungjawab.</li> </ol> <p>Ir Fadillah (Rektor Universitas Muhammadiyah):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menurut Fadillah, banyak pelanggaran demokrasi telah terjadi selama pemerintahan Jokowi.</li> </ol> <p>Prof Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Susi berujar, sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup, judul ini diberikan sebagai upaya untuk mempertahankan negara hukum yang demokratis, moral, dan bermartabat.</li> </ol> <p>Akif Khilmiyah (Guru Besar UMY):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“Dari KPK yang dikebiri, pejabat yang korup, DPR yang tidak melindungi anak negeri, dan beberapa hakim MK yang tidak memiliki moral dan harga diri,”</li> <li>Akif berujar, puncak dari semua ini adalah pelanggaran etika politik konstetasi menjelang pemilihan presiden 2024 dan upaya pemerintah untuk memecat hakim MK.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	<p>Pada bagian penutup, penulis menyampaikan informasi pernyataan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait aspirasi yang mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara agar tercipta Pemilu 2024 yang adil dan jujur.</p>
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Beberapa sivitas akademika kampus di Indonesia mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
	<b>Where</b>	Universitas di Indonesia
	<b>When</b>	Berita ini diterbitkan pada 03 Februari 2024 dan pernyataan

		sembilan sivitas akademika mulai 31 Januari 2024 hingga 3 Februari 2024.
	<b>Who</b>	Ir Fadillah (Rektor Universitas Muhammadiyah), Prof Susi Dwi Harijanti (Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad), Hadin Muhjad (Ketua Senat Universitas Lambung Mangkurat), Hary Effendi (Penggagas Aliansi Civitas Akademika Unand), Prof Amran Razak (Ketua Dewan Kehormatan Unhas Makassar), Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Ketua Dewan Guru Besar UI), Prof Fathul Wahid (Rektor UII), Prof Koentjoro (Guru Besar Fakultas Psikologi), Akif Khilmiyah (Guru Besar UMY).
	<b>Why</b>	Terdapat tindakan penyimpangan moral demokrasi pada pemerintahan Presiden Jokowi.
	<b>How</b>	Beberapa pernyataan dari sivitas akademika terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo serta keadaan kondisi demokrasi jelang Pemilu 2024 salah satunya, sivitas akademika UGM, memberikan 'Petisi Bulaksumur' yang berisikan permohonan untuk Presiden Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel ini menginformasikan Beberapa sivitas akademika kampus di Indonesia mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu dijelaskan dalam paragraf 4 – 8 yang menjelaskan sivitas akademika UGM memberikan 'PetisiBulaksumur' yang berisikan permohonan untuk Presiden Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi. Dalam paragraf 9 – 15 menjelaskan UII menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi dalam 'Indonesia Darurat Kenegarawan'. Dalam paragraf 16 – 21 UI menyampaikan 'Deklarasi Kebangsaan' yang berisi mengkritik demokrasi Indonesia sekarang. Dalam paragraf 22 – 26 Unhas menyampaikan 'Unhas Bergerak Untuk Demokrasi'. Dalam paragraf 27 – 32 Unand menyampaikan pernyataan terkait kondisi bangsa Indonesia jelang Pemilu 2024. Dalam paragraf 33 – 37 ULM menyampaikan 'deklarasi kebangsaan'. Dalam paragraf 38 – 42 Univ. Muhammadiyah Bangka Belitung menyampaikan 'Deklarasi Seruan Kebangsaan'. Dalam paragraf 43 – 49 Unpad menyampaikan 'Petisi Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermatabat'. Dalam paragraf 50 – 57 UMY menyampaikan pesan moral 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban'.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto beberapa sivitas akademika Universitas Indonesia yang memakai jubah hitam di Rotunda UI, Depok. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, jika dilihat melalui judul beritanya terlihat upaya jurnalis ingin menyampaikan informasi mengenai pernyataan beberapa sivitas akademisi kampus di Indonesia yang mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jika dilihat dari *lead*, latar informasi, dan kutipan

sumber beritanya, Kompas.com menggambarkan informasi yang serupa dengan judul, yakni sivitas akademika yang berasal dari kesembilan campus Indonesia berseru dalam mengkritik demokrasi pemerintah Presiden Jokowi. Pada bagian penutup, penulis menyampaikan informasi pernyataan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait aspirasi yang mendesak Presiden Joko Widodo agar melaksanakan konstitusional untuk menjadi tuan rumah Indonesia agar tercipta Pemilu 2024 adil serta jujur. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari *headline*, latar informasi, *lead*, serta kutipan sumber yang mengutamakan penjelasan dari beberapa sivitas akademisi kampus di Indonesia yang mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

## ● 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip berita, terlihat jurnalis menggunakan rumus aritkel 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu beberapa sivitas akademika kampus di Indonesia mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

## 3. Struktur Tematik

Sedangkan struktur tematik pada berita tersebut, dan keseluruhannya artikel ini menginformasikan Beberapa sivitas akademika kampus di Indonesia mengkritik demokrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu dijelaskan dalam paragraf 4 – 8 yang menjelaskan sivitas akademik UGM memberikan ‘Petisi Bulaksumur’ yang berisikan permohonan untuk Presiden Jokowi agar balik kepada koridor demokrasi. Dalam paragraf 9 – 15 menjelaskan UII menyampaikan kritik kepada pemerintahan Jokowi dalam ‘Indonesia Darurat Kenegarawan’. Dalam paragraf 16 – 21 UI menyampaikan ‘Deklarasi Kebangsaan’ yang berisi mengkritik demokrasi Indonesia sekarang. Dalam paragraf 22 – 26 Unhas menyampaikan ‘Unhas Bergerak Untuk Demokrasi’. Dalam paragraf 27 – 32 Unand menyampaikan pernyataan terkait kondisi bangsa Indonesia jelang Pemilu 2024. Dalam paragraf 33 – 37 ULM

menyampaikan ‘deklarasi kebangsaan’. Dalam paragraf 38 – 42 Univ. Muhammadiyah Bangka Belitung menyuarkan ‘Deklarasi Seruan Kebangsaan’. Dalam paragraf 43 – 49 Unpad menyampaikan ‘Petisi Seruan Padjadjaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Bermatabat, serta Beretika’. Dalam paragraf 50 – 57 UMY menyampaikan pesan moral ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto beberapa sivitas akademika Universitas Indonesia yang memakai jubah hitam di Rotunda UI, Depok. Foto ini dipakai untuk mengenalkan tokoh yang ada di dalamnya serta hubungannya dengan judul berita, juga akan menarik bagi pembaca.

#### I. Analisis Framing Berita 9

- Judul** : Menteri Basuki Temui Jokowi di Istana, Seusai Pencoblosan Pemilu
- Sumber** : Kompas.com
- Tanggal** : 14 Februari 2024
- Ringkasan** : Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR dalam ke Istana Presiden, Jakarta pada Rabu 14 Februari 2024. Menteri Basuki tiba di Istana Kepresidenan menggunakan mobil dinas bernomor RI 34. Berdasarkan pantauan Kompas.com, mobil tersebut memasuki kompleks istana sekitar pukul 17.56 WIB.

Tabel 4. 9 Analisis Artikel Berita 9

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Menteri Basuki Temui Jokowi di Istana, Seusai Pencoblosan Pemilu
	<b>Lead</b>	Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu 14 Februari 2024.
	<b>Latar Informasi</b>	Suasana Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
	<b>Kutipan Sumber Pernyataan Opini</b>	- 1. Menurut pantauan Kompas.com, mobil RI 34 tiba di kompleks istana pada pukul 17.56 WIB. 2. Sebelumnya, pada pukul 16.43 WIB, mobil RI 117 tiba di Istana Kepresidenan. 3. Tidak ada informasi resmi yang diberikan tentang

		kehadiran Menteri Basuki di Istana hingga berita ini ditulis.
		4. Kehadirannya kali ini terjadi selama masa libur nasional pemungutan suara pemilihan umum 2024, yang baru saja berakhir Rabu siang.
Skrip	Penutup	Artikel ini ditutup oleh informasi tambahan mengenai Presiden Jokowi dan para menteriya melakukan pencoblosan di TPS masing – masing.
	What	Suasana Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta.
	Where	Istana Kepresidenan, Jakarta
	When	14 Februari 2024
	Who	Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
	Why	-
	How	Kedatangan Menteri Basuki terpantau dari mobil dinas RI 34 yang masuk pada pukul 17.56 WIB melewati halaman depan Gedung Sekretariat Negara dan menuju pintu Bali sebelah depan Istana Merdeka. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut soal kehadiran tersebut.
Tematik	Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat	Secara keseluruhan artikel berita ini menyampaikan tentang kedatangan Menteri Basuki ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari pencoblosan Pemilu 2024. Penulis juga menyampaikan informasi tambahan terkait Presiden Jokowi dan para menteriya melakukan pencoblosan di TPS masing – masing.
Retoris	Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto mobil dinas RI 34 yang masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 14 Februari 2024. Foto ini memperlihatkan detail spesifik mengenai fenomena yang diberikan pada isi berita.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, jika diperlihatkan *headline* beritanya terlihat upaya penulis ingin menyampaikan terkait informasi mengenai kedatangan Menteri Basuki ke Istana Kepresidenan, Jakarta usai pencoblosan pemungutan suara Pemilu 2024. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com ini menegaskan latar informasi dari isi berita. Tidak terdapat kutipan sumber pada berita ini. Lalu, terdapat pernyataan opini wartawan yang menginformasi kronologi kedatangan Menteri Basuki ke Istana Kepresidenan. Dan artikel ini ditutup oleh informasi tambahan mengenai Presiden Jokowi dan para menteriya melakukan pencoblosan di TPS masing – masing. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan para sumber yang menyebarkan berita kedatangan Menteri

Basuki ke Istana Kepresidenan, Jakarta usai pencoblosan pemungutan suara Pemilu 2024.

## 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel tersebut, bisa dilihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR datang ke Istana Presiden, Jakarta.

## 3. Struktur Tematik

Dari struktur tematik pada artikel pemberitaan tersebut, secara menyeluruh artikel berita ini menyampaikan tentang kedatangan Menteri Basuki ke Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari pencoblosan Pemilu 2024. Penulis juga menyampaikan informasi tambahan terkait Presiden Jokowi dan para menterinya melakukan pencoblosan di TPS masing – masing.

## 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto mobil dinas RI 34 yang masuk ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada 14 Februari 2024. Foto ini memperlihatkan detail spesifik mengenai fenomena yang diberikan pada isi berita.

### J. Analisis *Framing* Berita 10

**Judul** : Bertemu SuryaPaloh UsaiPilpres, JokowiDinilai Sedang  
"Memecah, Mencegah, dan Merangkul"

**Sumber** : Kompas.com

**Tanggal** : 21 Februari 2024

**Ringkasan** : Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, mengakui bahwa Presiden Jokowi telah melaksanakan tiga step: memecah, mencegah, dan merangkul. Saat Presiden Jokowi berjumpa bersama Ketua

Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Minggu, 18 Februari 2024 lalu.

Tabel 4. 10 Analisis Artikel Berita 10

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Bertemu SuryaPaloh UsaiPilpres, JokowiDinilai Sedang "Memecah, Mencegah, dan Merangkul"
	<b>Lead</b>	Presiden Jokowi berjumpa bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 18 Februari 2024 lalu, Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, menyatakan bahwa Presiden Jokowi melakukan tiga langkah: memecah, mencegah, dan merangkul.
	<b>Latar Informasi</b>	Suanana pernyataan Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Surya Paloh.
	<b>Kutipan Sumber</b>	<p>Hanta Yuda (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saya mengistilahkan bahwa Pak Jokowi sedang melakukan tindakan seperti 3M, dalam pertemuan dengan Pak Surya ini. 3M berarti memecah, mencegah, dan merangkul,"</li> <li>2. Hanta berujar, bahwa pertemuan Jokowi dan Surya Paloh juga dimaksudkan untuk menghindari pertemuan antara Paloh dan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P.</li> <li>3. "Jika Pak Surya sudah goyang dan bergeser - geser sedikit, paling tidak menerima hasil, maka ada kemungkinan bahwa perubahan akan terjadi, dan kemungkinan koalisi Amin akan runtuh,"</li> <li>4. Lanjut Hanta, Jokowi harus menghindari pertemuan dua pemimpin partai politik ini agar PDI-P dan Nasdem tidak bersekutu menjadi oposisi pada pemerintahan berikutnya.</li> <li>5. "Ini akan menjadi awal pertemuan yang akan mengkonsolidasi opisisi, karena jika Ibu Mega dan Pak Surya bertemu, ada kemungkinan akan ada oposisi yang terkonoslidasi. Itu juga bisa dihindari Pak Jokowi,"</li> <li>6. "Kita menyadari bahwa meskipun Prabowo-Gibran dilantik, mereka masih kekurangan 50% kursi di parlemen. Mereka membutuhkan dukungan parlemen yang cukup,"</li> <li>7. "Untuk menyukkseskan agenda pemerintahan dan mengajukan proposal kebijakan, minimal simple majority atau mayoritas sederhana harus mencapai 55-60 persen,"</li> </ol> <p>Presiden Joko Widodo :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Memang ada pertemuan, dan itu akan sangat menguntungkan negara kita dan perpolitikan kita,"</li> </ol> <p>Ahmad Ali (Wakil Ketua Umum Partai Nasdem):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Bisa dilihat dari pertemuan itu bahwa Pak Surya dan Pak Jokowi adalah bagian dari koalisi Pak Jokowi 2019.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan demikian, Anies tidak lagi memiliki dukungan politik yang kuat untuk mendorong agenda perubahan.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan informasi tambahan mengenai pernyataan Ahmad Ali selaku Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa pertemuan Surya Paloh dan Preside Jokowi merupakan hal biasa yang dilakukan, karena Nasdem komitmen menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Hanta Yuda mengkritik pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh usai pilpres, ia menilai Presiden Jokowi melakukan tiga langkah: memecah, mencegah, dan merangkul.
	<b>Where</b>	Program Obrolan News Room Kompas.com
	<b>When</b>	21 Februari 2024
	<b>Who</b>	Hanta Yuda (Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia), Presiden Joko Widodo, Ahmad Ali (Wakil Ketua Umum Partai Nasdem).
	<b>Why</b>	Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Surya Paloh usai pilpres, di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024.
	<b>How</b>	Pertemuan tersebut diartikan Hanta bahwa Presiden Jokowi mencegah pertemuan antara Surya Paloh dan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P yang dinilai dapat memicu bergabung menjadi oposisi pada pemerintahan berikutnya. Namun, Jokowi mengklaim bahwa pertemuannya bersama Paloh hanya pertemuan biasa dalam membahas masalah politik. Ditambah pernyataan Ahmad Ali bahwa Nasdem masih bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Artikel berita ini berfokus pada pernyataan Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia yang menanggapi soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh usai pilpres. Penulis menyampaikan fakta terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh yang dikutip dari pernyataan Presiden Jokowi. Pernyataan pada teks berita ini bersumber dari kutipan wawancara Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Presiden Joko Widodo. Penulis juga memberikan informasi tambahan terkait pernyataan Ahmad Ali dalam menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Presiden Joko Widodo yang berada dikeramaian masyarakat di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, foto ini menegaskan topik yang diangkat dalam berita ini. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian terdapat penggunaan kata "Mengkonsolidasi oposisi" frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa kemungkinan akan ada tindakan persatuan menjadi sekelompok orang/partai politik yang menentang dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, saat melihat melalui judul beritanya memperlihatkan upaya jurnalis ingin menyampaikan terkait informasi mengenai pernyataan Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia dalam menilai soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh usai pilpres. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Kompas.com informasi ketika Presiden Jokowi berjumpa bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 18 Februari 2024 lalu, Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, menyatakan bahwa

Presiden Jokowi melakukan tiga langkah: memecah, mencegah, dan merangkul. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif, pada *lead* artikel berita ini mengatakan latar informasi dalam berita. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni dari Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan Ahmad Ali. Artikel ini diakhiri informasi tambahan mengenai pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali selaku bahwa pertemuan Surya Paloh dan Preside Jokowi adalah bentuk yang biasa yang dilakukan dikarenakan Nasdem berkomitmen untuk menjadikan dirinya sebagai koalisi pemerintah era Jokowi-Ma'ruf Amin. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan sumber yang menyebarluaskan respons Hanta Yuda menilai soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh slesai pilpres dapat Mencegah, Memecah, serta Merangkul.

## **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip *lead* artikel tersebut, terlihat penulis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *what* yaitu Hanta Yuda mengkritik pertemuan Presiden Jokowi dan Surya Paloh usi pilpres, ia menilai Presiden Jokowi melakukan tiga langkah: memecah, mencegah, dan merangkul.

## **3. Struktur Tematik**

Dari struktur tematik pada berita, artikel tersebut memiliki fokus untuk pernyataan Hanta Yuda yang merupakan seorang Direktur Eksekutif Poltracking di Indonesia menjawab terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh usai pilpres. Penulis menyampaikan fakta terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh yang dikutip dari pernyataan Presiden Jokowi. Pernyataan dalam tulisan berita tersebut didapatkan dari kutipan wawancara Hanta Yuda selaku Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Presiden Joko Widodo. Penulis juga memberikan informasi tambahan terkait

pernyataan Ahmad Ali dalam menanggapi pertemuan Surya Paloh dengan Presiden Jokowi.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Presiden Joko Widodo yang berada dikeramaian masyarakat di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, foto ini menegaskan topik yang diangkat dalam berita ini. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian terdapat penggunaan kata "Mengkonsolidasi oposisi" frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa kemungkinan akan ada tindakan persatuan menjadi sekelompok orang/partai politik yang menentang dan mengkritik kebijakan pemerintah. Penulis juga menegaskan pernyataan sumber "Jika Pak Surya sudah goyang dan bergeser - geser sedikit, paling tidak menerima hasil, maka ada kemungkinan bahwa perubahan akan terjadi, dan kemungkinan koalisi Amin akan runtuh" hal ini bertujuan untuk menegaskan kemungkinan akan ada perubahan yang diterima Surya Paloh dari pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

#### 4.2.2. Analisis Framing Berita Republika.co.id

##### K. Analisis Framing Berita 11

**Judul** : KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024  
**Sumber** : Republika.co.id  
**Tanggal** : 09 November 2023  
**Ringkasan** : Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengonfirmasi Presiden Jokowi tetap netral dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat usia empat puluh tahun yang memungkinkan anak presiden, Gibran Rakabuming Raka, menyalonkan kandidat cawapres, muncul gagasan bahwa Presiden Jokowi tidak netral.

Tabel 4. 11 Analisis Artikel Berita 11

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Judul	KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024

	<b>Lead</b>	Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan, menjamin bahwa Presiden Joko Widodo akan tetap netral selama pelaksanaan pemilu presiden 2024. Gagasan bahwa Presiden Jokowi tidak netral muncul setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat usia empat puluh tahun yang artinya putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat mencalonkan diri sebagai cawapres.
	<b>Latar Informasi</b>	Muncul gagasan bahwa Presiden Jokowi tidak bersikap netral muncul setelah Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatan mengenai syarat usia 40 tahun, yang memungkinkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Merespons hal tersebut, Moeldoko menyatakan Presiden Jokowi netral pada Pilpres 2024.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Menurut pemahaman saya, dalam beberapa kesempatan, saya telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan memberitahukan kepadanya bahwa saya bersikap netral dalam pemilihan kali ini. Presiden juga selalu menyatakan bahwa dia memegang posisi yang sama, yaitu netral,”</li> <li>2. “Jadi tolong pahami ini secara keseluruhan karena jika tidak, hal itu akan selalu menunjukkan bahwa presiden atau pemerintah dinilai tidak netral,”</li> <li>3. “Meskipun mereka berada di kementerian, kita semua berharap mereka tidak lagi menggunakan seluruh jajarannya untuk kepentingan politik praktis. Hal ini karena lembaganya sudah diatur oleh undang-undang. Tidak memperbolehkan penggunaan sarana prasarana tersebut,”</li> <li>4. “Memang terlihat Kabinet kita penuh dengan warna-warni, tetapi prioritas utama kami adalah pemerintahan ini harus beroperasi secara efektif dan memberikan pelayanan publik dengan baik,”</li> <li>5. “Polisi dan TNI sama. Tidak diperbolehkan menggunakan alat yang dimiliki untuk kepentingan politik praktis. Karena sudah ada aturannya, dan akan berdampak pada praktik politik bawahannya. Itu benar-benar tidak diperbolehkan. Sebab aturannya jelas ada,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dia juga pastikan bahwa sikap netralitas Jokowi tidak dapat dikompromikan.</li> <li>2. Meskipun begitu, Moeldoko mempercayakan kepada masyarakat untuk menilai sikap Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden 2024.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan kutipan dari Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang menyatakan TNI dan Polri tidak diperbolehkan dalam penggunaan sarana negara demi kepentingan politik praktis. Karena dapat memberi pengaruh kepada bawahannya dalam berpolitik praktis.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	KSP Moeldoko menjamin Jokowi Netral pada Pemilihan Presiden 2024
	<b>Where</b>	Gedung Bina Graha, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat
	<b>When</b>	9 November 2023
	<b>Who</b>	Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan
	<b>Why</b>	Presiden Joko Widodo kerap memberi kode kepada kandidat calon presiden, dan ditambah keputusan MK dalam mengabulkan gugatan syarat usia empat puluh tahun yang memberikan kesempatan Gibran Rakabuming Raka, dapat mencalonkan diri sebagai cawapres.
	<b>How</b>	Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat usia empat puluh tahun yang artinya putra Presiden Jokowi,

<p><b>Tematik</b></p>	<p><b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b></p>	<p>Gibran Rakabuming Raka, dapat mencalonkan diri sebagai cawapres. Dan sikap Presiden Joko Widodo yang kerap memberi kode – kode. Akibatnya, masyarakat menjadi mempertanyakan soal netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum 2024</p> <p>Secara menyeluruh bahwa artikel berita ini penulis menyampaikan bagaimana tanggapan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menanggapi tanggapan masyarakat terkait sikap netral Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum 2024. Penulis menggunakan kutipan sumber dari Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan untuk menyampaikan tanggapannya. Kemudian, penulis juga menyampaikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan sikap netral dalam pemilihan umum 2024.</p>
<p><b>Retoris</b></p>	<p><b>Kata, Gambar, Grafik</b></p>	<p><b>Idiom, Foto,</b></p> <p>Terdapat foto Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang sedang diwawancarai oleh wartawan. Penggunaan foto ini bertujuan untuk menekankan judul “KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024” bahwa berita berisi pernyataan langsung Moeldoko yang menekankan fakta informasi dari berita ini.</p> <p>Penggunaan kata “kode-kode” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tersirat yang tersembunyi yakni Presiden Joko Widodo yang mendeskripsikan calon kandidat pilpres 2024.</p> <p>Penggunaan kata “kabinet yang warna-warni” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa anggota kabinet berasal dari berbagai macam latar belakang.</p> <p>Penggunaan kata “tidak bisa ditawar” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa sikap netralitas Presiden Joko Widodo yang tidak akan berubah.</p> <p>Penggunaan kata “bukan domainnya pemerintah” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa konteks yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak harus ikut campur dalam menangani hal tersebut karena bukan bagian dari tanggungjawabnya.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis, saat melihat melalui *headline* beritanya terlihat upaya jurnalis dalam menyampaikan terkait informasi mengenai pernyataan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan mengatakan jika Presiden Jokowi tengah-tengah atau netral dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2024. Pada bagian *lead* menjelaskan latar informasi berita ini yaitu terkait susana tanggapan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang diwawancarai oleh reporter pada Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat tentang Presiden Jokowi akan berlaku netralis selama pelaksanaan Pilpres 2024. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil

wawancara wartawan dengan narasumber yakni Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan, hal ini memiliki tujuan dalam menyampaikan kesan pihak yang berwenang dalam membuktikan fakta informasi berita. Artikel tersebut ditutup dengan kutipan dari Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang menyatakan TNI dan Polri tidak diperbolehkan dalam penggunaan sarana negara demi kepentingan politik praktis. Karena dapat memberi pengaruh kepada bawahannya dalam berpolitik praktis. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang megnutamakan fakta dari *headline*, latar informasi, *lead*, serta sitasi dari informan yang menyebarkan respons Moeldoko terhadap sikap Presiden Jokowi tersebut.

## **2. Struktur Skrip**

• Dalam struktur skrip artikel tersebut, dilihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat usia empat puluh tahun yang artinya anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat menyalonkan menjadi kandidat cawapres. Dan sikap Presiden Jokowi yang kerap memberi kode – kode. Akibatnya, masyarakat menjadi mempertanyakan soal netralitas Presiden Joko Widodo dalam pemilihan umum 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Dari struktur tematik pada artikel pemberitaan tersebut, secara menyeluruh bahwa artikel berita ini penulis menyampaikan bagaimana tanggapan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menanggapi tanggapan masyarakat terkait sikap netral Presiden Jokowi dalam pemilihan umum 2024. Penulis menggunakan kutipan sumber dari Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan untuk menyampaikan tanggapannya. Kemudian, penulis juga menyampaikan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menekankan sikap netral dalam pemilu 2024.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto pada artikel adalah foto Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan yang sedang melakukan wawancara dengan wartawan. Penggunaan foto tersebut bertujuan dalam mengutamakan judul “KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024” bahwa berita berisi pernyataan langsung Moeldoko yang menekankan fakta informasi dari berita ini. Penggunaan kata “kode-kode” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tersirat yang tersembunyi yakni Presiden Joko Widodo yang mendeskripsikan calon kandidat pilpres 2024. Penggunaan kata “kabinet yang warna-warni” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa anggota kabinet berasal dari berbagai macam latar belakang. Penggunaan kata “tidak bisa ditawar” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa sikap netralitas Presiden Joko Widodo yang tidak akan berubah. Penggunaan kata “bukan domainnya pemerintah” frasa ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa konteks yang menunjukkan bahwa pemerintah tidak harus ikut campur dalam menangani hal tersebut karena bukan bagian dari tanggungjawabnya.

#### L. Analisis Framing Berita 12

**Judul** : Jokowi Dinilai Beri Sinyal Siap 'TurunGunung'  
Kampanye untuk Prabowo-Gibran

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 24 Januari 2024

**Ringkasan** : Pada 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan boleh berkampanye pada pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi siap ‘turun gunung’ kampanye untuk mendukung paslon Prabowo – Gibran. Aditya Perdana, Pengamat Politik dari UI juga menilai bahwa presiden menjadi aktor di balik layar dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Selain itu, Moeldoko, Staf Kepresidenan juga menanggapi dari pernyataan Presiden Jokowi.

Tabel 4. 12 Analisis Artikel Berita 12

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
-------------------	-----------------	------------------

<b>Sintaksis</b>	<b>Judul</b>	Jokowi Dinilai Beri Sinyal Siap 'Turun Gunung' Kampanye untuk Prabowo-Gibran
	<b>Lead</b>	Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pada hari ini terkait pemilihan presiden memicu perdebatan di media sosial. Jokowi menyatakan bahwa presiden tidak hanya memiliki hak untuk berkampanye dalam situasi pemilu saat ini, tetapi juga memiliki hak untuk memihak.
	<b>Latar Informasi</b>	Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi siap 'turun gunung' kampanye untuk mendukung paslon Prabowo – Gibran.
	<b>Kutipan Sumber</b>	<p>Ujang Komarudin (Direktur Indonesia Political Review):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujang mengatakan bahwa dari pernyataan Jokowi itu sinyal bahwa ia siap 'turun gunung' ikut mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran.</li> <li>2. "Di situlah kepentingan pribadi dan posisi presiden bertentangan secara psikologis. Di satu sisi, anaknya harus menang. Publik ingin presiden menunjukkan sifat negarawan. Saya menduga bahwa presiden akan turun gunung, yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas Prabowo-Gibran."</li> <li>3. "Saat ini, Pak Jokowi dalam pertarungan batin, antara kepentingannya pribadi dan jabatannya sebagai presiden,"</li> </ol> <p>Aditya Perdana (Pengamat politik Universitas Indonesia):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Menurut saya sederhana, Pak Jokowi bila mau berpihak tidak perlu lagi beri kode-kode. Saya merasa semua orang sudah tahu,"</li> <li>2. Aditya mengatakan bahwa presiden harus netral dalam pemilu tidak ada aturannya.</li> <li>3. "Masyarakat pasti menanyakan hal itu. Tentang memanfaatkan fasilitas negara, dan mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan kubu tertentu,"</li> </ol> <p>Presiden Joko Widodo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Ya boleh saya ikut kampanye, tapi kan tidak gunakan fasilitas negara itu penting,"</li> <li>2. "Itu lihat nanti,"</li> <li>3. "Hal itu yang saya tanya, memihak <i>ndak</i>,"</li> </ol> <p>Moeldoko (Staf Kepresidenan):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Ya, beliau selalu berbicara netral dengan kita,"</li> <li>2. "Pelayanan publik apakah tidak netral? Mari kita lihat secara objektif. Tidak ada perawatan untuk fungsi administrasi dan fungsi PSO dijalankan secara tidak netral. Wah, Pak Presiden tidak netral. Itu tidak ada,"</li> <li>3. "Kami tidak berbicara dalam sidang kabinet, kecuali tentang kelompoknya. Kabinet memiliki banyak calon. Karena itu, calon yang lain akan memperhatikan apa yang dikatakan presiden. Saya tidak pernah. Itu adalah cara saya melihatnya,"</li> <li>4. "jadi jangan melihat hal-hal dari kacamata subjektivitas. Jika subjektif memperlakukannya sebagai subjektif, sulit untuk melihatnya secara keseluruhan. Namun, jika melihatnya secara keseluruhan, ya itu benar,"</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Namun, yang dikhawatirkan oleh publik, katanya, adalah kemungkinan Presiden menggunakan fasilitas dan sumber daya negara untuk mendukung pasangan calon yang diinginkannya.</li> <li>2. Sebagai bukti, katanya, Presiden Jokowi tidak mengecualikan pihak manapun, termasuk pasangan calon nomor urut 1, 2, atau 3 selama pelaksanaan pemilu. Bahkan, pemerintah tetap memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan afiliasi politik mereka.</li> </ol>

<b>Skrip</b>	<b>Penutup</b>	Artikel berita ini ditutup dengan kutipan dari Moeldoko, Staf Kepresidenan, terkait netralitas Presiden Jokowi.
	<i>What</i>	Ujang Komarudin menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo, Presiden boleh berkampanye dan memihak.
	<i>Where</i>	Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta
	<i>When</i>	24 Januari 2024.
	<i>Who</i>	Ujang Komarudin selaku Direktur Indonesia Political Review, Aditya Perdana selaku Pengamat politik Universitas Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan Moeldoko, staf kepresidenan.
<b>Tematik</b>	<i>Why</i>	Pada 24 Januari 2024, Presiden memberikan pernyataan bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak pada pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
	<i>How</i>	Ujang menyoroti hal tersebut, bahwa Presiden Jokowi memberi sinyal terkait dirinya siap ‘turun gunung’ mengkampanyekan paslon Prabowo-Gibran. Dan Aditya, pengamat politik dari UI, menanggapi bahwa Presiden Jokowi turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Pada artikel berita ini berisikan pernyataan dari sejumlah pengamat politik yaitu Ujang Komarudin dan Aditya Perdana yang menyatakan Presiden Jokowi turut mendukung salah satu pasangan yakni Prabowo-Gibran. Pada berita ini disampaikan juga pernyataan dari Presiden Jokowi dan Moeldoko, Staf Kepresidenan terkait presiden boleh berkampanye dan boleh memihak.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik</b>	<b>Idiom,</b> Penggunaan foto dalam artikel berita tersebut adalah foto yang dipergunakan dalam artikel berita yakni foto Presiden Jokowi saat pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Pemilihan foto ini bisa dikatakan untuk memperkuat narasi tentang keberpihakan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 dan memberikan gambaran visual kepada para pembaca. Terdapat kata koherensi “turun gunung” yang dimaksud yaitu makna tindakan Presiden Jokowi yang bergerak membantu mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur tersebut, jika melihat melalui *headline* beritanya terlihat upaya jurnalis ingin menyampaikan terkait informasi mengenai tanggapan beberapa pengamat politik terkait pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Jika dilihat dari *lead* beritanya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan Presiden Jokowi menyatakan pendapat pada hari ini mengenai pemilihan presiden memicu perdebatan di media sosial. Jokowi menyatakan bahwa presiden tidak hanya memiliki hak untuk berkampanye dalam situasi pemilu saat ini, tetapi juga memiliki hak untuk memihak, hal yang ditulis dalam *lead* guna menyebarkan fakta mengenai isi berita ini.

Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan boleh berkampanye. Ujang Komarudin menilai Presiden Jokowi siap ‘turun gunung’ kampanye untuk mendukung paslon Prabowo – Gibran. Kutipan sumber yaitu dari Ujang Komarudin selaku Direktur Indonesia Political Review, Aditya Perdana selaku Pengamat politik Universitas Indonesia, Presiden Joko Widodo, dan Moeldoko, staf kepresidenan. Pemilihan sumber informasi seperti kutipan langsung dari para tokoh, yang dimaksud mengegaskan aktualitas informasi. Artikel berita ini diakhiri oleh pernyataan Moeldoko, Staf Kepresidenan, terkait netralitas Presiden Jokowi. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan sumber yang menyebarluaskan tanggapan pengamat politik terkait perkataan Presiden Jokowi terhadap presiden dapat melakukan kampanye dan boleh memihak.

## **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skript berita, terlihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Ujang menyoroti hal tersebut, bahwa Presiden Jokowi memberi sinyal terkait dirinya siap ‘turun gunung’ mengkampanyekan paslon Prabowo-Gibran. Dan Aditya, pengamat politik dari UI, menanggapi bahwa Presiden Jokowi turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

## **3. Struktur Tematik**

Pada struktur tematik di artikel tersebut, berisikan pernyataan dari sejumlah pengamat politik yaitu Ujang Komarudin dan Aditya Perdana yang menyatakan Presiden Jokowi turut mendukung salah satu pasangan yakni Prabowo-Gibran. Pada berita ini disampaikan juga pernyataan dari Presiden Jokowi dan Moeldoko, Staf Kepresidenan terkait presiden boleh berkampanye dan boleh memihak.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita tersebut adalah foto yang dipergunakan dalam artikel berita yakni foto Presiden Jokowi saat pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Pemilihan foto ini bisa dikatakan untuk memperkuat narasi tentang keberpihakan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 dan memberikan gambaran visual kepada para pembaca. Terdapat kata koherensi “turun gunung” yang dimaksud yaitu makna tindakan Presiden Jokowi yang bergerak membantu mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran..

#### M. Analisis Framing Berita 13

**Judul** : Pemuda ICMI Ajak Jokowi Junjung Tinggi Netralitas Pemilu 2024

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 04 Desember 2023

**Ringkasan** : Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) memohon Presiden Jokowi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mempertahankan netralitas untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pemilihan umum 2024. Serta meminta Agus Subiyanto selaku Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal dan institusi lainnya untuk menegakkan komitmen netralitas pada Pemilu 2024 dan memberikan sanksi tegas kepada anggota apabila terbukti melanggarnya.

Tabel 4. 13 Analisis Artikel Berita 13

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Pemuda ICMI Ajak Jokowi Junjung Tinggi Netralitas Pemilu 2024
	<b>Lead</b>	Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia (ICMI) memohon Presiden Jokowi untuk menjaga keadilan dan ingritas dalam Pemilu 2024 dengan sikap netral dan menjaga kekuasaan.
	<b>Latar Informasi</b>	Terkait aksi Pemuda ICMI yang mengungkapkan aspirasi mereka terhadap Presiden Joko Widodo agar menjaga netralitas dalam Pemilu 2024.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Ismail Rumadan (Ketua Umum Pemuda ICMI): 1. “Kondisi ini semakin buruk akibat ketidaknetralan Mahkamah Konstitusi (MK) dan proses pemanggilan

		pejabat sementara kepala daerah yang tampak tidak transparan.”
		2. “Oleh karena itu, kami meminta seluruh pihak untuk meningkatkan pengawasan ketat dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan proses pemilu.”
		3. “Kami yakin bahwa hanya dengan bekerja sama kita bisa mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang telah kita perjuangkan. Kita harus bersinergi untuk memastikan Pemilu dan Pilpres 2024 berlangsung dengan sehat dan adil.”
		-
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	Artikel ini ditutup dengan pernyataan Presiden Joko Widodo mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dengan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kandidat presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Aspirasi Pemuda ICMI terhadap Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum 2024.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	04 Desember 2023
	<b>Who</b>	Ismail Rumadan, Ketua Umum Pemuda ICMI
	<b>Why</b>	Ismail Rumadan, Ketua Umum Pemuda ICMI menyatakan keemasannya tentang berbagai laporan yang menunjukkan bahwa mungkin ada kecurangan dalam Pemilu 2024.
	<b>How</b>	Pemuda ICMI mendorong seluruh masyarakat untuk dalam berpartisipasi dalam mengawal dan menyuarakan apabila terdapat bentuk ketidakadilan dalam proses Pemilu 2024. Pemuda ICMI juga memberikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo beserta jajarannya untuk bersikap netral dan menjaga integritas, keadilan dalam Pemilu 2024.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Pada keseluruhan berita ini, penulis ingin menyampaikan aksi aspirasi yang dilakukan Pemuda ICMI untuk menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Ismail kepada media. Disampaikan juga bahwa pemilu menjadi tonggak penting dalam sebuah demokrasi, selain itu perlunya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama memantau dan menyuarakan apabila menemukan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilihan umum 2024.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah Presiden Joko Widodo yang sedang makan siang bersama tiga capres 2024 yakni Anies, Prabowo, dan Ganjar di Istana Merdeka. Penggunaan foto ini bertujuan untuk menekankan judul “Pemuda ICMI Ajak Jokowi Junjung Tinggi Netralitas Pemilu 2024” bahwa berita berisi penegasan dari Pemuda ICMI meminta Presiden Jokowi dalam berpegang teguh tinggi dalam Pemilu 2024 yang menegaskan fakta pesan dari berita.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur ini, saat melihat melalui judul beritanya terlihat upaya jurnalis ingin menyampaikan informasi mengenai pernyataan Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) memohon Presiden Jokowi untuk

mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mempertahankan netralitas untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pemilihan umum 2024. Jika dilihat dari *lead* beritanya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan terkait Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim di Indonesia (ICMI) memohon Presiden Jokowi untuk menjaga keadilan dan ingritas dalam Pemilu 2024 dengan sikap netral dan menjaga kekuasaan. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Terkait aksi Pemuda ICMI yang mengungkapkan aspirasi mereka terhadap Presiden Joko Widodo agar menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni Ismail Rumadan selaku Ketua Umum Pemuda ICMI. Artikel ini ditutup dengan pernyataan Presiden Joko Widodo memperingati para ASN supaya bertindak netralis dengan tidak memperlihatkan pendukung terhadap kandidat capres cawapres dalam Pilpres 2024 yang disampaikan pada 30 Oktober 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari *headline*, latar informasi, *lead*, serta sitasi sumber yang menhyebarkan upaya Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) memohon Presiden Jokowi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mempertahankan netralitas untuk menjaga keadilan dan integritas dalam pemilihan umum 2024.

## 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel tersebut, dilihat jurnalis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Kompas.com terlihat mbingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Pemuda ICMI mendorong seluruh masyarakat untuk dalam berpartisipasi dalam mengawal dan menyuarakan apabila terdapat bentuk ketidakadilan dalam proses Pemilu 2024. Pemuda ICMI juga memberikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo beserta jajarannya dalam berperilaku netral dan menjaga integritas, keadilan pada Pemilu 2024.

## 3. Struktur Tematik

Dari struktur tematik pada artikel, keseluruhan berita mengutamakan penyampaian gerakan Pemuda ICMI untuk menyampaikan permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2024. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung oleh Ismail kepada media. Disampaikan juga bahwa pemilu menjadi tonggak penting dalam sebuah demokrasi, selain itu perlunya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama memantau dan menyuarakan apabila menemukan bentuk ketidakadilan dalam proses pemilihan umum 2024.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah Presiden Joko Widodo yang sedang makan siang bersama tiga capres 2024 yakni Anies, Prabowo, dan Ganjar di Istana Merdeka. Penggunaan foto ini bertujuan untuk menekankan judul “Pemuda ICMI Ajak Jokowi Junjung Tinggi Netralitas Pemilu 2024” bahwa berita berisi penegasan dari Pemuda ICMI meminta Presiden Jokowi dalam berpegang teguh tinggi dalam Pemilu 2024 yang menegaskan fakta pesan dari berita.

#### N. Analisis Framing Berita 14

**Judul** : Wapres Ma'ruf tak akan Endorse Capres Tertentu

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 28 Desember 2023

**Ringkasan** : Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan sikap netralnya dalam pemilihan presiden 2024. Namun, sebagai individu dan warga negara dengan hak pilih, ia akan menentukan pilihannya di TPS nanti. Ia juga menegaskan bahwa memberikan kesempatan untuk para anggota keluarganya memilih calon pemimpin sesuai dengan kriterianya masing – masing.

Tabel 4. 14 Analisis Artikel Berita 14

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	Judul Lead	Wapres Ma'ruf tak akan Endorse Capres Tertentu Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menegaskan sikap netralnya dalam pemilihan presiden 2024. Sebagai wakil presiden, dia menunjukkan sikap netral. Namun, sebagai

		individu dan warga negara dengan hak pilih, ia akan menentukan pilihannya di TPS nanti.
	<b>Latar Informasi</b>	Suasana pernyataan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada siaran pers BPMI Setwapres mengenai pilihan pada Pemilu 2024.
	<b>Kutipan Sumber</b>	KH Ma'ruf Amin (Wakil Presiden RI): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Saya mengartikan bahwa dari bahasa kiai disebut <i>amrun syakhshiyun qolbiyun</i>, dan itu adalah persoalan hati dan personal."</li> <li>2. Kiai Ma'ruf mengatakan bahwa sesuai dengan perintah agama, ia mengingatkan untuk para umat memilih calon pemimpin yang terbaik.</li> <li>3. Kiai Ma'ruf berujar, ketiga pasangan Capres dan Cawapres sudah memenuhi syarat secara formal.</li> <li>4. "Secara umum, seseorang yang telah melewati verifikasi dianggap sebagai calon dan memenuhi syarat secara formal. Namun, jika masalahnya berkaitan dengan masalah material, situasinya akan berbeda. Namun, secara formal, dia telah memenuhi syarat, dan oleh karena itu dia lolos. Jadi hanya perlu memilih dari yang terbaik, yang telah lolos secara formal."</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Sehingga, masyarakat hanya perlu membandingkan kriteria materilnya untuk menentukan pilihan terbaik.
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup oleh pernyataan Ma'ruf Amin terkait pertanyaan wartawan mengenai dirinya akan mengarahkan sanak keluarganya dalam memilih calon tertentu, lalu ia menegaskan bahwa membebaskan anggota keluarganya untuk memilih Capres dan Cawapres sesuai dengan kriteria masing – masing.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Ma'ruf Amin menegaskan dirinya netral dan tidak akan memberikan 'endorse' kepada Capres manapun.
	<b>Where</b>	Siaran pers BPMI Setwapres
	<b>When</b>	28 Desember 2023
	<b>Who</b>	H Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI.
	<b>Why</b>	Untuk menjalankan perintah agama, Ma'ruf Amin mengarahkan umatnya untuk memilih pemimpin yang terbaik.
	<b>How</b>	Ma'ruf Amin menegaskan sebagai Wakil Presiden akan netral dalam Pilpres 2024. Namun sebagai warga negara dan pribadi tentu memiliki hak pilih, dan ia akan menuangkan pilihannya nanti waktu pemilihan di TPS.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel berita ini, membahas terkait sikap Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang akan netral dan tidak memberi endorse kepada pihak manapun. Penulis menyampaikan fakta terkait tiga pasangan calon Capres dan Cawapres pada pilpres 2024 ini, secara formal sudah sesuai memenuhi syarat. Kutipan pernyataan pada teks berita ini bersumber dari hasil wawancara Ma'ruf Amin. Penulis juga memasukan informasi terkait sikap Ma'ruf Amin yang memberi ruang kepada anggota keluarganya dalam memilih calon yang sesuai dengan kriteria masing – masing.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik</b>	<b>Idiom,</b> Penggunaan kata " <i>amrun syakhshiyun qolbiyun</i> " frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa istilah itu dari bahasa kiai yang berarti adalah persoalan hati dan personal. Terdapat kata " <i>endorment</i> " dalam kalimat "Saya tidak akan memberikan <i>endorment</i> calon tertentu", menekankan bahwa Ma'ruf Amin tidak akan melakukan tindakan mendukung calon pasangan tertentu pada pilpres 2024. Terdapat foto Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang sedang duduk mengisi acara. Penggunaan foto ini bertujuan untuk menekankan judul "Wapres Ma'ruf tak akan Endorse

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur sintaksis, melihat melalui judul beritanya terlihat upaya jurnalis ingin menyampaikan informasi mengenai pernyataan Ma’ruf Amin, Wakil Presiden yang akan netral pada pilpres 2024. Jika dilihat dari *lead* beritanya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan tanggapan KH Ma’ruf Amin menegaskan sikap netralnya dalam pemilihan presiden 2024. Sebagai wakil presiden, dia menunjukkan sikap netral. Namun, sebagai individu dan warga negara dengan hak pilih, ia akan menentukan pilihannya di TPS nanti. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni suasana pernyataan Wakil Presiden KH Maruf Amin pada siaran pers BPMI Setwapres mengenai pilihan pada Pemilu 2024. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni dari Ma’ruf Amin, Wakil Presiden. Artikel ini ditutup oleh pernyataan Ma’ruf Amin terkait pertanyaan wartawan mengenai dirinya akan mengarahkan sanak keluarganya dalam memilih calon tertentu, lalu ia menegaskan bahwa membebaskan anggota keluarganya untuk memilih Capres dan Cawapres sesuai dengan kriteria masing – masing. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta menggunakan *headline*, latar informasi, *lead*, kutipan informasi yang menyebarkan terakrit perkataan Ma’ruf Amin, Wakil Presiden yang akan netral pada pilpres 2024.

### 2. Struktur Skrip

Dalam struktur skrip artikel tersebut, memperlihatkan jurnalis memenuhi rumus berita 5W+1H. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terlihat meringkaskan berita yang menekankan unsur *how* yaitu Ma’ruf Amin menegaskan sebagai Wakil Presiden akan netral dalam Pilpres 2024. Namun sebagai warga negara dan

pribadi tentu memiliki hak pilih, dan ia akan menuangkan pilihannya nanti waktu pemilihan di TPS.

### 3. Struktur Tematik

Pada struktur tematik pada berita, dalam menyeluruh artikel berita ini, membahas terkait sikap Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang akan netral dan tidak memberi endorse kepada pihak manapun. Penulis menyampaikan fakta terkait tiga pasangan calon Capres dan Cawapres pada pilpres 2024 ini, secara formal sudah sesuai memenuhi syarat. Kutipan pernyataan pada teks berita [Republika.co.id](http://Republika.co.id) bersumber dari hasil wawancara Ma'ruf Amin. Penulis juga memasukan informasi terkait sikap Ma'ruf Amin yang memberi ruang kepada anggota keluarganya dalam memilih calon yang sesuai dengan kriteria masing – masing.

### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Ma'ruf Amin, Wakil Presiden yang sedang duduk mengisi acara. Tujuan penggunaan foto ini untuk menekankan bahwa berita berisi pernyataan langsung Ma'ruf Amin yang menekankan fakta informasi dari berita ini. Kemudian terdapat penggunaan kata “*amrun syakhshiyun qolbiyun*” frasa ini digunakan untuk menekankan bahwa istilah itu dari bahasa kiai yang berarti adalah persoalan hati dan personal. Terdapat kata “*endorsment*” dalam kalimat “Saya tidak akan memberikan *endorsment* calon tertentu”, menekankan bahwa Ma'ruf Amin tidak akan melakukan tindakan mendukung calon pasangan tertentu pada pilpres 2024.

#### O. Analisis *Framing* Berita 15

<b>Judul</b>	: Jokowi dan Prabowo Makan Malam Bersama, Ini Penjelasan Istana
<b>Sumber</b>	: <a href="http://Republika.co.id">Republika.co.id</a>
<b>Tanggal</b>	: 05 Januari 2024

**Ringkasan** : Sebelum debat pemilihan presiden ketiga, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan serta capres, Prabowo Subianto. Pada 5 Januari tahun 2024, pertemuan diadakan di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng. Merespons hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan bahwasanya pertemuan yang dilakukan dalam rangka makan malam masakan nusantara. Ia juga mengatakan bahwa tidak tahu persoalan apa yang di bahas dalam pertemuan tersebut. Dan terdapat informasi tambahan mengenai pernyataan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar bahwa Presiden Jokowi terus terang memberikan dukungan kepada paslon Prabowo – Gibran di pilpres 2024.

Tabel 4. 15 Analisis Artikel Berita 15

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Jokowi dan Prabowo Makan Malam Bersama, Ini Penjelasan Istana
	<b>Lead</b>	Sebelum debat pemilihan presiden ketiga, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto. Pada Jumat (5/1/2024) malam, pertemuan diadakan di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng.
	<b>Latar Informasi</b>	Merespons hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan dalam rangka makan malam masakan nusantara.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Ari Dwipayana (Koordinator Staf Khusus Presiden RI): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Ari, bahwa pertemuan tersebut di Rumah Makan Seribu Rasa sebab makasan di restoran tersebut enak.</li> <li>2. “Malam ini, Bapak Presiden didampingi Menhan Bp. Prabowo Subianto makan malam di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng untuk rileks sejenak mencoba masakan nusantara.”</li> <li>3. Katanya masakannya enak, makan malam masakan nusantara,”</li> </ol> Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Ya kan it sudah jelas ya,”</li> <li>2. “Jelas kan jadi ga usah diterjemahkan,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jokowi sendiri disebut-sebut telah dengan terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo dan Gibran.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup oleh pernyataan Airlangga Hartarto terkait bahwa Presiden Jokowi menunjukkan dukungan terhadap paslon Prabowo – Gibran pada pilpres 2024.
Skrip	<b>What</b>	Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI merespons terkait pertemuan Jokowi dan Prabowo di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng
	<b>Where</b>	Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta
	<b>When</b>	05 Januari 2024
	<b>Who</b>	Ari Dwipayana selaku Koordinator Staf Khusus Presiden RI dan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar.
	<b>Why</b>	Menjelang debat capres ketiga, Presiden Jokowi

			<p>mengadakan pertemuan bersama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa Menteng pada 5 Januari 2024.</p> <p>Merespons hal tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka rileks sejenak makan malam masakan nusantara di dampingi Bp. Prabowo. Namun, ia mengatakan tidak tahu topik pembahasan pertemuan tersebut, tapi kata Presiden Jokowi makanannya enak.</p> <p>Pada paragraf awal artikel berita ini, terlihat penulis berusaha untuk menyampaikan pernyataan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa. Selain itu, Ari mengatakan tidak tahu soal topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian, penulis menyampaikan informasi mengenai terkait foto yang tersebar luas terkait pertemuan Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih lengan panjang dan Prabowo tampak mengenakan kemeja batik lengan panjang. Dan penulis menyampaikan informasi tambahan mengenai tanggapan Airlangga Hartarto terkait sikap Jokowi yang menunjukkan dukungan kepada salah satu paslon Prabowo-Gibran.</p>
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	<b>How</b>	
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik</b>	<b>Idiom,</b>	<p>Terdapat foto Presiden Jokowi yang sedang berbicara bersama Menhan Prabowo di suatu acara. Penggunaan foto ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada topik informasi artikel berita ini.</p>

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur sintaksis, jika terlihat bagian *headline* beritanya terlihat upaya jurnalis mau menyuarkan informasi mengenai menyakaan Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana terkait jamuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jika dilihat dari *lead* beritanya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan informasi sebelum debat pemilihan presiden ketiga, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan dan capres urut 2, Prabowo Subianto. Malam hari pada 5 Januari 2024, pertemuan diadakan di Rumah Makan Seribu Rasa di Menteng. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana yang menjelaskan jika pertemuan yang dilakukan dalam rangka makan malam masakan nusantara. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber yaitu kutipan dari Ari Dwipayana dan Airlangga Hartarto. Artikel ini ditutup oleh pernyataan Airlangga Hartarto terkait bahwa Presiden Jokowi

menunjukkan dukungan terhadap paslon Prabowo – Gibran pada pilpres 2024. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari *headline*, *lead*, latar informasi serta kutipan informan yang menggambarkan informasi respons Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana terkait pertemuan yang dilakukan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

## **2. Struktur Skrip**

Dalam struktur skrip artikel tersebut, dilihat penulis telah memenuhi rumus berita 5W+1H. Republika.co.id terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu merespons hal tersebut, Ari Dwipayana mengemukakan jika jamuan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka rileks sejenak makan malam masakan nusantara di dampingi Bp. Prabowo. Namun, ia mengatakan tidak tahu topik pembahasan pertemuan tersebut, tapi kata Presiden Jokowi makanannya enak.

## **3. Struktur Tematik**

Dalam struktur tematik dalam artikel, terlihat usaha jurnalis mengemas secara keseluruhan artikel berita ini, membahas terkait pernyataan Ari Dwipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan Menhan Prabowo Subianto di Rumah Makan Seribu Rasa dalam awal paragraf. Selain itu, Ari mengatakan tidak tahu soal topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Kemudian, penulis menyampaikan informasi mengenai terkait foto yang tersebar luas terkait pertemuan Presiden Joko Widodo menggunakan kemeja putih berlengan panjang serta Prabowo tampak menggunakan kemeja batik berlengan panjang. Dan penulis menyampaikan informasi tambahan mengenai tanggapan Airlangga Hartarto terkait sikap Jokowi yang menunjukkan dukungan kepada salah satu paslon Prabowo-Gibran.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Presiden Jokowi yang sedang berbicara bersama Menhan Prabowo di suatu acara. Penggunaan foto ini bertujuan untuk memberikan penekanan pada topik informasi artikel berita ini.

#### P. Analisis Framing Berita 16

**Judul** : PDIP Ingatkan Jokowi: Kepala Negara Dituntut Netral

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 10 Januari 2024

**Ringkasan** : Pada Rabu, 10 Januari 2024, Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekretaris Jenderal PDIP hadir pada acara memperingati HUT ke-51 PDIP, pada Sekolah Partai PDIP, Jakarta. Hasto memberi pernyataan kepada wartawan usai ditanya persoalan netralitas Presiden Jokowi pada pilpres 2024. Ia menganggap bahwa Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden. Ia juga mengatakan, rakyat pasti akan menyaksikan hal itu dan menanggapi bahwa tanggung jawab seorang pemimpin negara adalah tidak berpihak.

Tabel 4. 16 Analisis Artikel Berita 16

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b> <i>Lead</i>	PDIP Ingatkan Jokowi: Kepala Negara Dituntut Netral Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menanggapi anggapan bahwa Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden. Seperti yang dia katakan, rakyat pasti akan menyaksikan hal itu dan menanggapi bahwa tanggung jawab seorang pemimpin negara adalah tidak berpihak.
	<b>Latar Informasi</b>	Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Hasto Kristiyanto (Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan): 1. Lanjut Hasto, nanti orang akan melihat satu kata dengan tindakan. 2. "Rakyat hanya perlu menunggu tindakan pemimpin ini. Ini adalah konsistensi yang diharapkan dari seorang pemimpin," 3. "Mengapa ada pemilihan? Rakyat tentu akan memilih siapa yang konsisten dan siapa yang tidak. Serta siapa yang digerakkan oleh ambisi individu atau harapan rakyat," Megawati Soekarnoputri (Ketua Umum PDIP):

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Pemilu bukanlah alat yang digunakan oleh elite politik untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan cara apapun. Moral dan etika harus dijunjung tinggi selama pemilu,”</li> <li>2. “Kekuasaan itu tidak bersikap langgeng loh, karena yang langgeng itu yang di atas, dan kekuasaan dapat berhenti apa pun jabatannya,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasto juga memegang janji Presiden Jokowi yang telah berkali-kali menekankan pentingnya netralitas selama proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.</li> </ol>
	<b>Penutup</b>	Pada artikel ini ditutup oleh informasi tambahan mengenai pernyataan Megawati Soekarnoputri menurutnya bahwa keprihatinan masyarakat yang mendapatkan intimidasi karena Pemilu 2024. Namun, baginya masyarakat dalam menyuarakan suaranya yang didasari pada keyakinan akar rumput. Dan terakhir, Megawati juga menuturkan bahwa kekuasaan tidak bersifat langgeng.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP menuntut Presiden Jokowi untuk netral pada pilpres 2024.
	<b>Where</b>	Sekolah Partai PDIP
	<b>When</b>	10 Januari 2024
	<b>Who</b>	Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.
	<b>Why</b>	Hasto Kristiyanto beranggapan bahwa Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk paslon nomor urut dua, Prabowo - Gibran pada pilpres 2024.
	<b>How</b>	Hasto berupaya mengingatkan Presiden Jokowi selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan untuk netral dalam pilpres 2024.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Pada awal tulisan berita berusaha mengutarakan latar informasi yakni terkait pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden. Penulis juga menyampaikan anggapan hasto terkait pemilu, bahwa pemilu adalah hasil keputusan rakyat, karena hanya rakyat yang memilih pemimpin harapan rakyat atau pemimpin yang digerakkan oleh ambisi suatu kelompok. Serta penulis menyampaikan pernyataan narasumber untuk melihat konsistensi presiden dalam pilpres 2024. Penulis juga menyampaikan informasi tambahan pernyataan Megawati, Ketua Umum PDIP yang disampaikan dalam acara HUT ke-51 PDIP terkait moral dan etika perlu dijunjung tinggi dalam proses Pemilu 2024.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Hasto Kristiyanto yang diwawancarai wartawan. Penggunaan foto ini bertujuan untuk menekankan narasumber dan topik informasi dari berita ini. Kemudian, terdapat kata “pasang badan” frasa ini menekankan pada seseorang yang bertindak sebagai pelindung/penanggung jawab atas sesuatu hal, yang dimaksud dalam teks berita yaitu Presiden Jokowi sebagai pelindung untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden.

*Sumber: Olahan Peneliti, 2024*

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Teruntuk struktur sentaksis, jika melihat melalui judul beritanya terlihat upaya jurnalis ingin menyampaikan terkait informasi mengenai pernyataan

Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP yang berbicara untuk Presiden Jokowi agar netral pada pilpres 2024. Jika dilihat dari *lead* beritanya, Republika.co.id menggambarkan tanggapan Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP menanggapi terkait Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden. Seperti yang dia katakan, rakyat pasti akan menyaksikan hal itu dan menanggapi bahwa tanggung jawab seorang pemimpin negara adalah tidak berpihak. *Lead* berita ini merepresentasikan latar informasi. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP serta Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Artikel ini ditutup dengan informasi tambahan mengenai pernyataan Megawati Soekarnoputri menurutnya bahwa keprihatinan masyarakat yang mendapatkan intimidasi karena Pemilu 2024. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta terkait dari judul, *lead*, serta latar informasi sitasi sumber yang memberikan informasi respons Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP memberikan peringatan kepada Presiden Jokowi agar netral pada pilpres 2024.

## 2. Struktur Skrip

Pada bagian struktur artikel tersebut, terlihat artikel pun memenuhi rumus berita 5W+1H. Republika.co.id terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Hasto berupaya mengingatkan Presiden Jokowi selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan untuk netral dalam pilpres 2024.

## 3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik di artikel berita, terlihat pada awal tulisan berita berusaha mengutarakan latar informasi yakni terkait pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa Presiden Jokowi terkesan pasang badan untuk Prabowo

Subianto setelah debat calon presiden. Penulis juga menyampaikan anggapan haso terkait pemilu, bahwa pemilu adalah hasil keputusan rakyat, karena hanya rakyat yang memilih pemimpin harapan rakyat atau pemimpin yang digerakkan oleh ambisi suatu kelompok. Serta penulis menyampaikan pernyataan narasumber untuk melihat konsistensi presiden dalam pilpres 2024. Penulis juga menyampaikan informasi tambahan pernyataan Megawati, Ketua Umum PDIP yang disampaikan dalam acara HUT ke-51 PDIP terkait moral dan etika perlu dijunjung tinggi dalam proses Pemilu 2024.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Haso Kristiyanto yang diwawancarai wartawan. Penggunaan foto ini bertujuan untuk menekankan narasumber dan topik informasi dari berita ini. Kemudian, terdapat kata “pasang badan” frasa ini menekankan pada seseorang yang bertindak sebagai pelindung/penanggung jawab atas sesuatu hal, yang dimaksud dalam teks berita yaitu Presiden Jokowi sebagai pelindung untuk Prabowo Subianto setelah debat calon presiden.

#### Q. Analisis Framing Berita 17

**Judul** : Presiden Boleh Memihak, PDIP: Pernyataan Jokowi Anggota Parpol/Presiden?

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 24 Januari 2024

**Ringkasan** : Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP PDIP, menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai keberpihakannya pada Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan RI 1. Ia juga mempertanyakan posisi Presiden Jokowi saat menyampaikan hal tersebut sebagai kepala negara atau anggota parpol. Sebab dalam catatan sampai saat ini Jokowi masih sebagai kader PDIP. Selain itu, Komarudin juga menambahkan bahwa Presiden Jokowi perlu memperhatikan etik dan moral dalam Pilpres 2024.

Tabel 4. 17 Analisis Artikel Berita 17

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan	
Sintaksis	<b>Judul</b>	Presiden Boleh Memihak, PDIP: Pernyataan Jokowi Anggota Parpol/Presiden?	
	<b>Lead</b>	Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai keberpihakannya pada Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan RI 1, membuatnya heran.	
	<b>Latar Informasi</b>	Komarudin Watubun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden memiliki hak berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.	
	<b>Kutipan Sumber</b>	Komarudin Watubun (Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. “Jadi, Anda harus bertanya kepada Pak Jokowi, bukan saya, tentang posisi yang dia katakan sebagai apa? Karena hanya anggota parpol yang dapat berkampanye, jika tidak, mereka tidak dapat,”</li> <li>2. “Kalau dia bukan anggota parpol, berarti dia terdaftar sebagai tim kampanye dari salah satu calon kandidat presiden, oleh karena itu baru boleh untuk kampanye. Memang itu dari segi aturan, tapi kan Pak Jokowi saat ini Presiden RI,”</li> <li>3. “Ini kan saya berbicara soal etik dan moral bernegara. Bahwa posisi etik di atas hukum. Di atas pengaturan perundang-undangan, sebab etik itu persoalan kepatutan dan kepantasan,”</li> </ol>	
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Hal ini karena hingga saat ini, Jokowi masih memiliki status sebagai anggota PDIP.	
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup oleh informasi tanggapan Komarudin Watubun terkait etika dan moral yang perlu dijaga Presiden Jokowi di masa periode terakhirnya sebagai kepala negara.	
	Skrip	<b>What</b>	Komarudin Watubun menyoroti sikap Presiden Jokowi yang berpihak pada Pilpres 2024.
		<b>Where</b>	Jakarta.
		<b>When</b>	24 Januari 2024.
		<b>Who</b>	Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
<b>Why</b>		Presiden Jokowi menyatakan dirinya boleh berkampanye berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang presiden berkampanye, asal cuti & tidak menggunakan fasilitas negara.	
<b>How</b>		Pernyataan Presiden tersebut, memicu Komarudin Watubun mempertanyakan posisi Presiden Jokowi saat menyampaikan hal tersebut sebagai anggota partai politik atau sebagai kepala negara. Sebab, status Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Selain itu, Komarudin juga menyampaikan bahwa etika dan moral perlu dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.	
Tematik	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan bahwa artikel ini berisi tentang tanggapan Komarudin Watubun terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait hak presiden dalam berkampanye. Kutipan pernyataan pada teks berita ini bersumber dari hasil wawancara narasumber, Komarudin Watubun.	
Retoris	<b>Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Komarudin Watubun, tetapi foto yang dilakukan bukanlah foto baru. Dalam menggunakan foto tersebut bermaksud memberi tampilan gambar terhadap tokoh yang sesuai dengan isi berita. terdapat kata “dia” dalam kalimat “Kalau dia bukan anggota parpol, berarti dia terdaftar sebagai tim kampanye dari salah satu calon kandidat presiden, oleh karena itu baru boleh untuk kampanye” yang menekankan bahwa yang dimaksud adalah Presiden Jokowi.	

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada struktur pertama artikel tersebut, jika melihat melalui *headline* terdapat upaya penulis *Republika.co.id* ingin menyampaikan terkait respons Komarudin Watubun terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait haknya dalam berkampanye pada pilpres. Jika dilihat dari *lead* beritanya, *Republika.co.id* menggambarkan tanggapan Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan DPP PDIP, menekankan pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai keberpihakannya pada Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan RI 1, membuatnya heran. Terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni Komarudin Watubun menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan Presiden memiliki hak berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Artikel ini ditutup dengan informasi penegasan Komarudin Watubun terkait etika dan moral yang perlu dijaga Presiden Jokowi di masa periode terakhirnya sebagai kepala negara. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan terkait fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan dari individu yang menyebarluaskan respons Komarudin Watubun terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait haknya dalam berkampanye pada pilpres.

### 2. Struktur Skrip

Dalam struktur *script* artikel, terlihat berita pun memenuhi rumus berita 5W+1H. *Republika.co.id* terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Pernyataan Presiden tersebut, memicu Komarudin Watubun mempertanyakan posisi Presiden Jokowi saat menyampaikan hal tersebut sebagai anggota partai politik atau sebagai kepala negara. Sebab, status Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP. Selain itu, Komarudin juga

menyampaikan bahwa etika dan moral perlu dijunjung tinggi oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.

### 3. Struktur Tematik

Pada struktur *thematic* di pemberitaan, terlihat penulis ingin menyampaikan secara menyeluruh artikel tersebut berisikan terkait tanggapan Komarudin Watubun terhadap pernyataan Presiden Jokowi terkait hak presiden dalam berkampanye. Kutipan jawaban dalam tulisan tersebut didapati dari hasil wawancara narasumber, Komarudin Watubun.

### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah foto Komarudin Watubun, tetapi foto yang dilakukan bukanlah foto baru. Dalam menggunakan foto tersebut bermaksud memberi tampilan gambar terhadap tokoh yang sesuai dengan isi berita. Kemudian, terdapat kata “dia” dalam kalimat “Kalau dia bukan anggota parpol, berarti dia terdaftar sebagai tim kampanye dari salah satu calon kandidat presiden, oleh karena itu baru boleh untuk kampanye” yang menekankan bahwa yang di maksud adalah Presiden Jokowi.

#### R. Analisis *Framing* Berita 18

**Judul** : Susul UGM dan UII, Sivitas Akademika UMY Sampaikan Kritik ke Jokowi

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 03 Februari 2024

**Ringkasan** : Sivitas akademika UMY menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di UMY. Pada hari Sabtu, 3 Februari 2024, para mahasiswa, rektor, dan dewan guru besar UMY berkumpul untuk menyerukan Pesan Kebangsaan serta Himbauan Normal 'Mengawal Demokrasi Indonesia yang Beradab. Menurut Akif Khilmiyah, Guru Besar UMY, hilang etika bernegara serta pelanggaran konstitusi telah meningkat pada akhir tahun belakangan.

Tabel 4. 18 Analisis Artikel Berita 18

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Susul UGM dan UII, Sivitas Akademika UMY Sampaikan Kritik ke Jokowi
	<b>Lead</b>	Sejumlah kampus terus mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
	<b>Latar Informasi</b>	Guru Besar UMY. Akif Khilmiyah sedang menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di UMY.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Akif Khilmiyah (Guru Besar UMY): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Akif, bahwa setahun belakangan ini, eskalasi pada pelanggaran konstitusi serta hilangnya etika bernegara terlihat terus terjadi.</li> <li>2. “Mulai dari KPK yang dibatasi kekuasaannya, pejabat yang terlibat korupsi, DPR yang tidak berfungsi dalam membela kepentingan rakyat, hingga hakim MK yang tidak beretika dan kehilangan harga diri,</li> <li>3. Akif melanjutkan bahwa puncaknya adalah pengekangan hakim MK oleh berbagai ambisi penguasa, serta mulai terlihatnya hilangnya etika dalam politik konstitusi menjelang Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari nanti.</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini Penutup</b>	- Artikel ini ditutup oleh informasi tambahan mengenai beberapa kampus sudah lebih dulu memberikan kritik kepada pemerintahan Jokowi, salah satunya UGM yang mengeluarkan Petisi Bulaksumur dan hari berikutnya UII menyerukan ‘Indonesia Darurat Kenegarawanan’.
Skrip	<b>What</b>	Sivitas Akademika UMY menyampaikan Kritik ke Pemerintahan Jokowi
	<b>Where</b>	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
	<b>When</b>	03 Februari 2024
	<b>Who</b>	Akif Khilmiyah selaku Guru Besar UMY
Tematik	<b>Why</b>	Menurut Akif Khilmiyah, Guru Besar UMY, pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika bernegara telah meningkat dalam setahun terakhir, sehingga ia menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral yang bertema ‘Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban’.
	<b>How</b>	Akif Khilmiyah, Guru Besar UMY berupaya memberi aspirasi kepada kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.
Retoris	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Pada bagian awal teks artikel berita ini, terlihat penulis berusaha menyampaikan latar informasi yakni pernyataan sivitas akademika UMY yang mengkritik kepemimpinan Presiden Jokowi. Penulis juga menyampaikan beberapa pelanggaran konstitusi hingga menghilangkan etika bernegara dalam setahun belakang. Serta penulis menyampaikan pernyataan narasumber tentang beberapa isi petisi terkait desakan kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.
	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik</b>	Penggunaan foto pada artikel berita ini, sosok Presiden Jokowi yang sedang diwawancarai. Foto yang digunakan untuk memperkenalkan tokoh yang menjadi topik pembicaraan artikel berita ini, dan bertujuan untuk menarik minat pembaca. Terdapat beberapa frasa yang menekankan maksud tertentu, diantaranya “Dimulai dari KPK yang dikebiri” kata “kebiri” menekankan bahwa fungsi KPK yang dihilangkan sejak Pemilu 2024. Kemudian dalam kalimat “kemudian pejabat yang doyan korupsi” terdapat kata “doyan” frasa ini menekankan para pejabat yang suka sekali korupsi. Lalu kalimat “DPR yang tak berfungsi dalam membela anak negeri” terdapat kata “anak negara”

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur ini, jika melihat melalui bagian judul beritanya terlihat upaya penulis ingin menyampaikan terkait informasi mengenai pernyataan sivitas akademika UMY dalam menyampaikan kritik pada pemerintahan Jokowi. Jika dilihat dari *lead* beritanya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan tanggapan sejumlah kampus terus mengeluarkan pernyataan penolakan terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). *Lead* berita ini merepresentasikan latar informasi, yaitu Guru Besar UMY. Akif Khilmiyah sedang menyerukan Pesan Kebangsaan dan Imbauan Moral terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi di UMY, terlihat penulis menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Kemudian, artikel ini ditutup dengan informasi tambahan mengenai beberapa kampus sudah lebih dulu memberikan kritik kepada pemerintahan Jokowi. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan terkait fakta dari judul, *lead*, latar informasi serta kutipan narasumber mengandung informasi jawaban sivitas akademika UMY dalam menyampaikan kritik pada pemerintahan Jokowi.

### 2. Struktur Skrip

Pada struktur *script* pemberitaan, terlihat jurnalis telah memenuhi rumus pemberitaan 5W+1H. [Republika.co.id](http://Republika.co.id) terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Akif Khilmiyah, Guru Besar UMY berupaya memberi aspirasi kepada kepemimpinan Presiden Jokowi untuk mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia.

### 3. Struktur Tematik

Di struktur *thematic* artikel tersebut, di bagian pertama tulisan pada berita, terlihat penulis berusaha menyampaikan latar informasi yakni pernyataan

sivitas akademika UMY yang mengkritik kepemimpinan Presiden Jokowi. Penulis juga menyampaikan beberapa pelanggaran konstitusi hingga menghilangkan etika bernegara dalam setahun belakang. Serta penulis menyampaikan pernyataan narasumber tentang beberapa isi petisi terkait desakan kepada Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

#### 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam artikel berita ini adalah sosok Presiden Jokowi yang sedang diwawancarai. Foto yang digunakan untuk memperkenalkan tokoh yang menjadi topik pembicaraan artikel berita ini, dan bertujuan untuk menarik minat pembaca. Kemudian, terdapat beberapa frasa yang menekankan maksud tertentu, diantaranya “Dimulai dari KPK yang dikebiri” kata “kebiri” menekankan bahwa fungsi KPK yang dihilangkan sejak Pemilu 2024. Kemudian dalam kalimat “kemudian pejabat yang doyan korupsi” terdapat kata “doyan” frasa ini menekankan para pejabat yang suka sekali korupsi. Lalu kalimat “DPR yang tak berfungsi dalam membela anak negeri” terdapat kata “anak negara” frasa ini menekankan DPR yang sudah tidak berfungsi membela penduduk atau masyarakat Indonesia.

#### S. Analisis Framing Berita 19

**Judul** : Menteri-Menteri Sambangi Istana Kepresidenan di  
Tengah Hitung Cepat

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 14 Februari 2024

**Ringkasan** : Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju terpantau mendatangi Istana Presiden Jakarta saat Rabu petang 14 Februari 2024. Terlihat bahwa Basuki Hadimuljono sebagai Perumahan Rakyat dan Menteri Pekerjaan Umum datang mendatangi Istana Presiden kisaran pukul 17.55 WIB. Dan sebelumnya menteri dengan kendaraan Hyundai Palisade, plat nomor RI 117 terpantau masuk ke Istana Presiden kisaran 16.45 WIB.

Tabel 4. 19 Analisis Artikel Berita 19

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Menteri-Menteri Sambangi Istana Kepresidenan di Tengah Hitung Cepat
	<b>Lead</b>	Saat proses hitung cepat Pemilu 2024 berlangsung, beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju tampak mengunjungi Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu sore.
	<b>Latar Informasi</b>	Beberapa menteri dari Kabinet Indonesia Maju mengunjungi Istana Kepresidenan di Jakarta ketika proses hitung cepat Pemilu 2024 berlangsung.
	<b>Kutipan Sumber</b>	-
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Sebelum Basuki, menteri lain terlihat memasuki kawasan Istana Kepresidenan dengan Hyundai Palisade berwarna hitam dengan plat nomor RI 117.
	<b>Penutup</b>	Artikel ini ditutup oleh informasi tambahan mengenai salah satu lembaga survei, Charta Politika Indonesia menunjukkan data sementara hasil hitung cepat pasangan Prabowo-Gibran, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, memimpin dengan perolehan suara sebesar 59,23 persen.
	Skrip	<b>What</b>
<b>Where</b>		Jakarta
<b>When</b>		14 Februari 2024
<b>Who</b>		Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
<b>Why</b>		Terlihat salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju, Basuki Hadimuljono, yang mengenakan kemeja putih, keluar dari Toyota Land Cruiser hitam dengan plat nomor RI 34, tiba di Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 17.55 WIB.
<b>How</b>		Kedatangan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju yang menyambangi Istana Kepresidenan berlangsung saat hitung cepat Pemilu 2024.
Tematik	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan penulis artikel berita ini ingin menyampaikan tentang kedatangan beberapa menteri kabinet Indonesia ke Istana Kepresidenan pada saat hitung cepat Pemilu 2024. Penulis juga memberikan informasi tambahan terkait perhitungan cepat oleh lembaga survei, Charta Politika Indonesia yang menunjukkan data sementara hasil hitung cepat pasangan Prabowo-Gibran, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2.
Retoris	<b>Kata, Gambar, Foto, Grafik, Idiom,</b>	Penggunaan foto dalam artikel berita tersebut adalah foto yang dipergunakan dalam artikel berita yakni ilustrasi suasana Istana Kepresidenan. Foto ini digunakan untuk bukti visual pada peristiwa, serta untuk menarik pembaca.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Dalam struktur *syntax*, jika melihat melalui judul beritanya terlihat upaya penulis ingin menyampaikan terkait informasi mengenai kedatangan beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju mendatangi Istana Presniden. Jika dilihat dari lead beritanya, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menggambarkan informasi saat hitung cepat

Pemilu 2024 berlangsung, beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju terpantau mendatangi Istana Presiden di Jakarta di Rabu sore. *Lead* berita ini memberikan latar informasi peristiwa dalam artikel berita. Artikel ini ditutup oleh informasi tambahan mengenai salah satu lembaga survei, Charta Politika Indonesia menunjukkan data sementara hasil hitung cepat Prabowo-Gibran, capres serta cawapres urutan 2, memimpin dengan mendapatkan total suara sebesar 59,23 persen. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang menonjolkan terkait fakta dari judul, latar informasi, *lead*, serta kutipan sumber yang menggambarkan terkait informasi mengenai kedatangan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mendatangi Istana Presiden.

## **2. Struktur Skrip**

- Pada struktur *script* artikel, terlihat jurnalis pun menetapkan rumus berita 5W+1H. Republika.co.id terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu kedatangan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang mendatangi Istana Presiden berlangsung saat hitung cepat Pemilu 2024.

## **3. Struktur Tematik**

Dalam struktur tematik tersebut, terlihat bahwa pada penyeluruhan artikel berita Republika.co.id ingin menyampaikan tentang kedatangan beberapa menteri kabinet Indonesia ke Istana Kepresidenan pada saat hitung cepat Pemilu 2024. Penulis juga memberikan informasi tambahan terkait perhitungan cepat oleh lembaga survei, Charta Politika Indonesia yang menunjukkan data sementara hasil hitung cepat kandidat Prabowo-Gibran, capres serta cawapres nomor 2.

## **4. Struktur Retoris**

Penggunaan foto dalam artikel berita tersebut adalah foto yang dipergunakan dalam artikel berita yakni ilustrasi suasana Istana Kepresidenan. Foto ini digunakan untuk bukti visual pada peristiwa, serta untuk menarik pembaca.

## T. Analisis Framing Berita 20

**Judul** : Idrus Marham Sebut Syak Wasangka Pasca-pemilu Bisa Ganggu Roda Pemerintahan

**Sumber** : Republika.co.id

**Tanggal** : 23 Februari 2024

**Ringkasan** : Idrus Marham, politikus Partai Golkar, berpendapat bahwa syak wasangka harus dihilangkan dari masyarakat. Dia berpendapat bahwa hal ini dapat mengganggu roda pemerintahan, terutama situasi setelah pemilu 2024. Ia berharap masyarakat dapat berpikir jernih usai Pemilu 2024, karena dalam sisi agama, syak wasangka dilarang, sebab masuk dalam penyakit hati dan bersifat su'udzon.

Tabel 4. 20 Analisis Artikel Berita 20

Perangkat Framing	Unit Pengamatan	Hasil Pengamatan
Sintaksis	<b>Judul</b>	Idrus Marham Sebut Syak Wasangka Pasca-pemilu Bisa Ganggu Roda Pemerintahan
	<b>Lead</b>	Idrus Marham, politikus Partai Golkar, berpendapat bahwa syak wasangka harus dihilangkan dari masyarakat. Dia berpendapat bahwa hal ini dapat mengganggu roda pemerintahan, terutama situasi setelah pemilu 2024.
	<b>Latar Informasi</b>	Sebagian masyarakat sudah terjerumus ke arus syak wasangka. Idrus Marham, Politikus Partai Golkar berpendapat situasi syak wasangka pasca Pemilu 2024 dapat mengganggu roda pemerintahan.
	<b>Kutipan Sumber</b>	Idrus Marham (politikus Partai Golkar): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut Idrus, pihak yang menang dalam Pemilu jangan lupa diri dan mabuk pada kemenangan, hingga dapat memancing syak wasangka itu.</li> <li>2. Lanjut Idrus, pemilu merupakan hajatan besar rakyat Indonesia., dan sudah ada tanda – tanda ke arah syak wasangka.</li> <li>3. Menurut Idrus, pertemuan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh tidak dipandang masyarakat dengan syak wasangka.</li> <li>4. Menurut Idrus, syak wasangka dilarang dalam sisi agama.</li> <li>5. “Hal itu disebut penyakit hati yang sifatnya su’udzon,”</li> </ol>
	<b>Pernyataan Opini</b>	1. Sekjen Tim Kerja Strategis (TKS), Prabowo Subianto-

		Gibran Rakabuming Raka ini mengharapkan agar semua orang tetap mampu mempertahankan pemikiran yang jernih setelah berakhirnya pemilu.
	<b>Penutup</b>	Artikel berita ini ditutup dengan informasi tanggapan Idrus terkait syak wasangka merupakan hal yang dilarang dalam agama yang sifatnya su'udzon dan disebut penyakit hati.
<b>Skrip</b>	<b>What</b>	Idrus Marham menyoroti kondisi pasca Pemilu 2024 dapat mengganggu roda pemerintahan.
	<b>Where</b>	Jakarta
	<b>When</b>	23 Februari 2024
	<b>Who</b>	Idrus Marham selaku politikus Partai Golkar
	<b>Why</b>	Idrus berpendapat bahwa syak wasangka telah terjadi pasca Pemilu 2024.
	<b>How</b>	Idrus merasa masyarakat dapat disandera oleh syak wasangka, salah satunya, sebagian masyarakat percaya terhadap <i>quick count</i> hasil Pemilu. Ia berharap masyarakat sadar untuk tidak terbawa arus syak wasangka.
<b>Tematik</b>	<b>Paragraf, Proporsisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat</b>	Secara keseluruhan artikel berita ini penulis ingin menyampaikan tanggapan Idrus Marham, politikus Partai Golkar, terkait kondisi pasca Pemilu 2024. Penulis menggunakan kutipan sumber dari Idrus Marham selaku politikus Partai Golkar.
<b>Retoris</b>	<b>Kata, Idiom, Gambar, Foto, Grafik</b>	Penggunaan kata "syak wasangka", frasa ini berarti syak dan sangkaan, digunakan untuk memunculkan elemen emosional pesan yang disampaikan pada berita. Penggunaan foto Idrus Marham, untuk menggambarkan terkait fakta informasi yang disampaikan pada artikel berita ini.

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

## Rincian Analisis

### 1. Struktur Sintaksis

Pada *structure* sintaksis tersebut, melihat melalui headline beritanya terlihat upaya penulis ingin menyampaikan terkait informasi pernyataan Idrus Marham menyoroti kondisi pasca Pemilu 2024. Jika dilihat dari lead beritanya, Republika.co.id menggambarkan informasi sebagian masyarakat sudah terjerumus ke arus syak wasangka. Idrus Marham, Politikus Partai Golkar berpendapat situasi syak wasangka pasca Pemilu 2024 dapat mengganggu roda pemerintahan. Terlihat penulis menyampaikan informasi

secara jelas dan efektif bila melihat dari latar informasi pada berita ini yakni mengenai sebagian masyarakat sudah terjerumus ke arus syak wasangka. Idrus Marham, Politikus Partai Golkar berpendapat situasi syak wasangka pasca Pemilu 2024 dapat mengganggu roda pemerintahan. Hal tersebut didukung oleh kutipan sumber dari hasil wawancara wartawan dengan narasumber yakni Idrus Marham selaku politikus Partai Golkar. Artikel berita ini ditutup dengan informasi tanggapan Idrus terkait syak wasangka merupakan hal yang dilarang dalam agama yang sifatnya su'udzon dan disebut penyakit hati. Bahwasanya, terlihat penulis menjaga ketertarikan pembaca yang berusaha melakukan *framing* pada artikel berita ini, yang mengutamakan fakta dari judul, latar informasi, *lead*, serta jawaban dari sumber yang menyebarluaskan pernyataan Idrus Marham menyoroti kondisi pasca Pemilu 2024.

## ● 2. Struktur Skrip

Pada struktur *script* artikel, terlihat jurnalis pun menetapkan rumus berita 5W+1H. Republika.co.id terlihat membingkai berita yang menekankan unsur *how* yaitu Idrus merasa masyarakat dapat disandera oleh syak wasangka, salah satunya, sebagian masyarakat percaya terhadap quick count hasil Pemilu. Ia berharap masyarakat sadar untuk tidak terbawa arus syak wasangka.

## 3. Struktur Tematik

Dalam struktur tematik, secara menyeluruh berita penulis ingin mengutarakan tanggapan Idrus Marham, politikus Partai Golkar, terkait kondisi pasca Pemilu 2024. Penulis menggunakan kutipan sumber dari Idrus Marham selaku politikus Partai Golkar.

## 4. Struktur Retoris

Penggunaan foto dalam berita adalah foto Idrus Marham, untuk menekankan fakta informasi yang disampaikan pada berita ini. penggunaan kata “syak wasangka”, frasa ini berarti syak dan sangkaan, digunakan untuk memunculkan elemen emosional pesan yang disampaikan pada sebuah artikel.

### 4.3. Hasil Analisis Framing Pemberitaan di kanal Kompas.com dan Republika.co.id

Pada peroleh analisis penelitian mengenai kerangka metode *framing* Gerald M. Kosicki dan Zhondang Pan memperlihatkan terdapat perbedaan pada bingkai berita terkait netralitas presiden dalam Pemilu 2024 di media daring Kompas.com serta Republika.co.id November 2023 – Februari 2024. Perbedaan ini diberikan pada table di bawah :

Tabel 4. 21 Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Netralitas Presiden Dalam Pemilu 2024

Perangkat Framing	Kompas.com	Republika.co.id
<b>Sintaksis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan kata untuk headline bernilai informatif.</li> <li>2. <i>Lead</i> disajikan lebih deskriptif menggambarkan kritik kepada Presiden Jokowi</li> <li>3. Berita diberikan bersifat <i>cover both side</i> dan objektve</li> <li>4. Akhir artikel lebih dengan menegaskan jawaban dari informan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilihan kata untuk headline lebih jelas dan ligas.</li> <li>2. <i>Lead</i> yang disajikan singkat atau <i>to the point</i> terkait persuasif agar Presiden Jokowi netral dalam Pemilu 2024.</li> <li>3. Berita memfokuskan persuasif kepada Presiden Jokowi.</li> <li>4. Akhir artikel menggunakan kutipan dari informan.</li> </ol>
<b>Skrip</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita berisikan 5W+1H yang mengutamakan unsur <i>what</i> terkait data yang merespons isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 yang sesuai dengan judul berita</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita berisi 5W+1H yang mengutamakan unsur <i>how</i> berisi terkait tanggapan informan yang mengkritik dengan mempersuaf Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024.</li> </ol>
<b>Tematik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita disusun menjelaskan kronologi secara detail dan beorientasi pada tanggapan beberapa pihak yang menanggapi isu netralitas Presiden.</li> <li>2. Sering menuliskan fakta dari pemberitaan – pemberitaan sebelumnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita ditulis dengan memfokuskan pada tanggapan pihak yang mengkritik dengan mempersuaf Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024.</li> </ol>
<b>Retoris</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan foto yang sesuai peristiwa dan sesuai juga dengan judul berita.</li> <li>2. Terdapat penekanan fakta, penulis menyajikan pernyataan sebelumnya, yang memberikan dampak emosional kepada pembaca</li> <li>3. Penggunaan kata yang digunakan memperlihatkan kekhawatiran jurnalis pada berita netralitas presiden dan menegaskan kritik pada Presiden Jokowi penggunaan “lempar kode”, “kritisi”, “diwanti – wanti”.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar yang disediakan berhubungan dengan judul.</li> <li>2. Terdapat beberapa memuat gambar/infografis untuk mempersuaf dalam menekankan fakta yang disampaikan dalam artikel berita.</li> <li>3. Penggunaan kata yang menunjukkan ketegasan jurnalis menekankan persuasif kepada Presiden Jokowi untuk netral menggunakan kata “Ajak”, “Pastikan”.</li> </ol>

(Sumber: Olahan Peneliti, 2024)

Didapati dari analisis terkait artikel berita Kompas.com secara menyeluruh terkait artikel ditemukannya beberapa aspek pada pemberitaan netralitas presiden dalam Pemilu 2024 periode November 2023 – Februari 2024. Pada penelitian ini mendapati pemingkaiian yang diutamakan Kompas.com berusaha membungkus berita yang informatif yaitu terkait kronologis masalah netralitas presiden dalam Pemilihan Umum 2024 serta Kompas.com berusaha menyelipkan kritikan kepada Presiden Jokowi, namun pemberitaan tetap objektif, tetap *cover both side*, dan tetap menyajikan pernyataan pemerintah meski pernyataan di latar belakang. Hampir setiap menganalisis artikel, Kompas.com memperlihatkan kutipan-kutipan berbagai sumber/pihak.

Dalam struktur sintaksis Kompas.com terdapat informasi runtutan fenomena secara mendetail, perkembangan isu netralitas Presiden dalam Pemilu 2024, dan pernyataan dari beberapa hal mengenai memperkuat dari *headline* berita tersebut. Selain itu, diperkuat dengan terdapat beberapa pernyataan dari para narasumber yang menggunakan kutipan pada berita Kompas.com, berusaha menyelipkan kritikan kepada Presiden Jokowi namun pemberitaan tetap informatif/objektif, tetap *cover both side*, tetap menyajikan pernyataan pemerintah meski pernyataan di masalalu/latar belakang. Narasumber yang didapat Kompas.com yaitu menyebutkan lembaga pemerintah, partai politik, pengamat politik, civitas akademika, dan Presiden Jokowi. Pada seluruh judul-judul artikel Kompas.com memiliki sifat informatif serta lebih condong mengenakan sub judul pada judul. Seperti pada judul “Jokowi Mengaku Netral tetapi Kerap Lempar Kode untuk Capres Tertentu, Moeldoko: Tergantung yang Artikan”, yang berisi informasi menjelaskan pernyataan staf kepresidenan, Moeldoko terkait sikap Presiden Jokowi yang kerap lempar kode untuk capres tertentu. Kompas.com biasanya menyajikan lead yang melengkapi judul artikel dengan menjelaskan informasi utamanya secara jelas, sehingga mempermudah pemahaman. Kompas.com sering menggunakan kutipan untuk memperkuat informasi yang disampaikan penulis, dan artikel umumnya ditutup dengan kutipan yang menegaskan poin penting yang telah disampaikan dalam artikel tersebut. Selanjutnya, dalam hal struktur skrip atau cara penulis menggambarkan sebuah berita, pemberitaan hampir serupa dengan struktur sintaksis, yaitu bagaimana

pernyataan – pernyataan beberapa tokoh yang menanggapi isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Dalam setiap artikel pemberitaan sudah lengkap mengandung unsur 5W+1H, dan dilihat keseluruhannya dari isi artikel berita Kompas.com menegaskan rumus *what* terkait informasi yang merespons isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 yang sesuai dengan judul berita. Kemudian, Dalam struktur tematik, atau cara penulis mengkomunikasikan fakta di Kompas.com, peneliti menemukan bahwa berita yang dipublikasikan mengandalkan kutipan dari sumber yang terlibat dalam pemberitaan. Peneliti juga berupaya untuk menyampaikan fakta yang sudah dilaporkan sebelumnya dalam pemberitaan.

Struktur retorik, yang mencakup bagaimana penulis menyoroti fakta dalam pemberitaan yang akan dipublikasikan. Dalam tulisan tersebut yang diunggah oleh Kompas memiliki pemilihan kosa kata untuk memperlihatkan kesiagaan penulis pada berita netralitas presiden serta menegaskan kritik di Presiden Jokowi menggunakan kata “lempar kode”, “kritisi”, “diwanti – wanti”. Dalam hal ini, Kompas.com tetap menjaga konsistensi dalam penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam pemberitaannya. Selanjutnya, ada terdapat ketegasan isi pesan yang bisa mempengaruhi pembaca secara psikis. Dalam memilih gambar, Kompas.com secara objektif menyesuaikan gambar dengan berita yang ingin disampaikan dan memberikan keterangan yang jelas.

Selanjutnya dari dilakukannya analisa dalam artikel berita Republika.co.id dalam menyeluruh menghadirkan sejumlah hal terkait berita isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Peneliti mendapati terhadap pembingkaiian utama oleh Republika.co.id yakni melihat isu tersebut terjadi dan memberikan tempat klarifikasi pada sosok tokoh terkait dalam menyampaikan tanggapannya terhadap peristiwa yang terjadi. Hal tersebut dibuktikan dari isi berita yang analisis Republika.co.id banyak menggunakan kata persuasif untuk Presiden Jokowi agar tetap netral dalam Pemilu 2024. Judul berita yang dipublikasi Republika.co.id menjadi lebih tegas. *Lead* yang ditulis singkat atau *to the point* terkait persuasif agar Presiden Jokowi netral dalam Pemilu 2024. Republika.co.id tidak memuat pernyataan opini tetapi berita dikemas dengan memfokuskan persuasif kepada

Presiden Jokowi. Selain itu, penutup pada artikel berita cenderung menggunakan kutipan persuasif dari narasumber.

Selanjutnya, dalam hal struktur skrip, yang mencakup cara penulis menceritakan suatu berita, pemberitaan hampir sejalan dengan struktur sintaksis, yaitu mengenai bagaimana peristiwa yang terjadi terkait pernyataan – pernyataan beberapa tokoh yang menanggapi isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Dalam setiap artikel pemberitaan sudah lengkap mengandung unsur 5W+1H, dan secara menyeluruh isi berita artikel dari Kompas.com mengeaskan rumus *how* terkait tanggapan narasumber yang mengkritik dengan mempersuaf Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024. Kemudian, pada struktur temati, bagaimana jurnalis menuliskan sebuah akurat dalam platform Republika.co.id, penelitian mendapatkan bahwa penulis berusaha memfokuskan pada tanggapan pihak yang mengkritik dengan mempersuaf Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024.

Lalu ada struktur retorik, yang mengacu pada bagaimana penulis menyoroti fakta-fakta yang akan dipublikasikan dalam pemberitaan. Dalam artikel yang disebar di Republika.co.id, peneliti mendapati beberapa kalimat ataupun kata yang mempersuaf untuk membangkitkan netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Penggunaan foto pada setiap berita di Republika.co.id tetap sesuai dengan pembahasan yang dibahas, serta seringkali memuat gambar/infografis yang mempersuaf guna menekankan fakta yang ingin disampaikan penulis dalam berita tersebut.

Berdasarkan hasil analisis pbingkai berita antara kedua portal media *online* tersebut, Kompas.com berusaha membungkus berita yang informatif yaitu terkait kronologis masalah netralitas presiden dalam Pemilihan Umum 2024 serta Kompas.com berusaha menyelipkan kritikan kepada Presiden Jokowi, namun pemberitaan tetap objektif, tetap *cover both side*, dan tetap menyajikan pernyataan pemerintah meski pernyataan di latar belakang. Hampir setiap artikel yang dianalisa, Kompas.com menghadirkan kutipan-kutipan yang beragam sumber informasi.

Sedangkan pbingkai yang dilakukan Republika.co.id terkait netralitas presiden dalam Pemilu 2024 mengutamakan terkait pernyataan dan tanggapan dari

satu pihak tertentu yang melibatkan langsung dalam menyampaikan pernyataan untuk merangkai isi berita. *Republika.co.id* berupaya untuk mengutamakan kalimat atau kata yang mempersuasif seperti ajakan maupun imbauan agar para khalayak dapat menciptakan situasi netral pada Pemilu 2024.

#### 4.4. Diskusi Teoritik

Peningkatan pemberitaan isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 pada *website* *Kompas.com* serta *Republika.co.id* menunjukkan perbedaan pada faktualitas yang hadir pada artikel. *Kompas* berusaha membungkus berita yang informatif yaitu terkait kronologis masalah netralitas presiden dalam Pemilihan Umum 2024 serta *Kompas.com* berusaha menyelipkan kritikan kepada Presiden Jokowi, namun pemberitaan tetap objektif, *tetap cover both side*, dan tetap menyajikan pernyataan pemerintah meski pernyataan di latar belakang. Hampir setiap artikel yang dianalisa, *Kompas.com* menyiarkan kutipan berbagai sumber informasi. Sedangkan *Republika.co.id* berfokus pada peningkatan yang berisikan upaya persuasi dari beberapa tokoh kepada Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024. *Republika.co.id* menuliskan teks deskriptif fenomena dari salah satu sosok yang di mana mempunyai kekuasaan dalam menyuarakan informasi terkait klarifikasi terhadap isu tersebut.

Pada penelitian terdahulu, dengan judul “Analisis Framing Konstruksi Pemberitaan Presiden Jokowi Terkait Persiapan Pemilu 2024 Di Media *Kompas.Com* Dan *Republika.Co.Id*” membahas bagaimana peningkatan kedua berita media *online* tersebut saat melakukan peningkatan peristiwa Presiden Jokowi untuk persiapan Pemilu 2024. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peningkatan pemberitaan terkait isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 pada media daring *Kompas.com* serta *Republika.co.id*.

Dalam model *framing* Pan dan Kosicki memiliki empat struktur yakni skrip, sintaksis, retorik, dan tematik. Seluruh struktur ini sudah dijelaskan pada hasil pembahasan diatas. Dan peneliti menemukan beberapa perbedaan dari kedua media *online*, dalam struktur sintaksis *Kompas* mempunyai judul yang menekankan pernyataan polemik dan sumber yang terlaksana, contohnya

pernyataan dari staf kepresidenan, Moeldoko terkait sikap Presiden Jokowi yang kerap lempar kode untuk capres tertentu, dan keterangan yang dimuat dalam judul. Sedangkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) mempunyai headline pemberitaan yang mengutamakan isu/peristiwa serta melihat fenomena itu terjadi. Contohnya adalah “KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024” atau “PDIP Ingatkan Jokowi: Kepala Negara Dituntut Netral”.

Dalam struktur skrip, atau cara penulis menceritakan pada berita, peneliti mendapatkan sejumlah perbedaan antara kedua media daring ini. [Kompas.com](http://Kompas.com) menegaskan unsur *what* terkait informasi yang merespons isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 yang sesuai dengan judul berita. Sedangkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menonjolkan unsur *why* dalam pemberitaan, dalam beritanya berusaha mengemas terkait tanggapan narasumber yang mengkritik dengan mempersuasif Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024. Dalam struktur tematik, atau cara penulis menyajikan fakta di [Kompas.com](http://Kompas.com), peneliti menemukan bahwa berita yang diterbitkan berfokus pada kutipan dari pihak yang terlibat dalam pemberitaan dan peneliti berusaha menyampaikan fakta pemberitaan yang sudah diterbitkan sebelumnya. Sedangkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) berusaha memfokuskan pada tanggapan pihak yang mengkritik dengan mempersuasif Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024.

Dalam struktur retorik, atau cara penulis mengutamakan fakta dalam pemberitaan untuk dipublikasikan. [Kompas.com](http://Kompas.com) memiliki sejumlah penegasan dalam kosa kata pernyataan yang digunakan narasumber dalam menunjukkan kekesalan pada perilaku tidak netral Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024. Selain itu, ada banyak penegasan pesan yang bisa mempengaruhi pembaca secara emosional. Sedangkan, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) menemukan beberapa menggunakan kata ataupun kalimat mempersuasif yang bersifat positif untuk mengembangkan netralitas dalam Pemilu 2024. Pemilihan gambar yang dipergunakan pada kedua media daring ini juga memiliki perbedaan maksud. [Kompas.com](http://Kompas.com) secara objektif menyesuaikan visual dengan berita yang ingin disampaikan dan memberikan keterangan yang jelas, sedangkan [Republika.co.id](http://Republika.co.id) tetap sesuai dengan pembahasan yang dibahas, serta seringkali memuat gambar/infografis yang mempersuasif guna menekankan fakta yang ingin disampaikan penulis dalam

berita tersebut. Menurut keempat perangkat *framing* Pan and Koscki, terdapat rangkaian untuk menunjukkan *framing* suatu pemberitaan. Bagaimana jurnalis menyusun dan menceritakan suatu peristiwa, serta bagaimana jurnalis memilih kata atau idiom untuk berita mereka menunjukkan cenderung lebih terlihat dari para reporter untuk dapat mengerti dan sikap dalam melihat sebuah peristiwa. Seorang jurnalis menggunakan strategi ini untuk memberikan keyakinan khalayak bahwa berita yang disebarkan tersebut bersifat fakta dan akurat (Eriyanto, 2018).

Pembingkaiian Kompas.com ataupun Republika.co.id jika dilihat sesuai konsep *jurnalisme online* yang mengutamakan kebenaran dan kredibilitas pada artikel yang dipublikasikan menggunakan internet (Romli, 2018). Pada kedua media tersebut memiliki kecenderungan menyebarluaskan artikel berita mengenai isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 sesuai dengan konsepnya. Kompas.com ataupun Republika.co.id mempublikasikan berita terpercaya serta faktual sesuai dengan informasi utama dari narasumber yang akurat dan relevan sebelum pengumpulan data dan penyebaran artikel. Hal tersebut seperti pemberitaan yang menjelaskan bahwa pihak KSP Moeldoko Pastikan Jokowi Netral pada Pilpres 2024, maka narasumber utama adalah pihak KSP Moeldoko. Perbedaan ialah Kompas.com berisikan narasumber yang mendukung berita utama yang ingin disebarkan, namun Republika.co.id hanyalah berisikan narasumber utama.

Publikasi artikel isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 yang dilaksanakan Kompas.com serta Republika.co.id berkaitan bersama konsep. Pemberitaan adalah jenis informasi menarik dan penting bagi publik atau pembaca (Muslimin, 2019, p. 18). Pemberitaan yang dilaksanakan Kompas.com serta Republika.co.id mengenai fenomena netralitas Presiden dalam Pemilu 2024 periode November 2023 hingga Februari 2024 memenuhi kriteria informasi yang penting dan menarik bagi pembaca. Hal tersebut dapat diperlihatkan Kompas.com serta Republika.co.id yang lebih condong memberikan kronologi secara detail dan tanggapan dari pernyataan beberapa tokoh penting seperti lembaga pemerintah, pengamat politik, partai politik, civitas akademika, dan beberapa tokoh penting terhadap berita yang diangkat peneliti, dan berita yang dipublikasi merefleksikan fenomena terbaru yang sesuai pada saat itu.

Dalam publikasi Kompas.com serta Republika.co.id menyajikan artikel sesuai hasil penyelidikan terlaksana oleh para reporter serta dilakukan pengelolaan artikel berita yang informatif dan deskriptif, menggunakan unsur 5W + 1H dan sumber yang terpercaya dan aktual. Dengan demikian, Kompas.com Republika.co.id menghasilkan publik agar percaya jika berita yang diberikan sesuai dengan fakta yang ada dan terpercaya.

Kemudian, bila dilihat dari nilai berita yang digunakan Kompas.com serta Republika.co.id terdapat kesamaan diantara ke dua media tersebut. Kompas dan Republika memiliki kesamaan dalam nilai berita aktualitas/kebaruan dan Ketokohan (*Prominence*). Nilai berita ketokohan (*Prominence*) bisa terbukti sesuai dengan pendiri pada ke dua artikel berita media *online* yang mengangkat isu netralitas sosok Presiden Joko Widodo serta tanggapan beberapa tokoh penting seperti lembaga pemerintah, partai politik, pengamat politik, dan civitas akademika. Kemudian, kebaruan ke dua media bisa diperlihatkan mulai dari timeline dan kutipan dari para informan yang melakukan wawancara. Pada penulisan berita, tentu mengandung nilai pemberitaan guna memastikan bahwa artikel yang diunggah memiliki kualitas.

Selanjutnya apabila melihat dari sisi ideologi dan kepemilikan media pada seluruh artikel berita terhadap netralitas presiden dalam Pemilu 2024. Kompas.com memiliki ideologi umum yakni dengan *tagline* 'jernih melihat dunia' berupa menampilkan berita atau sajian informasi yang objektif tentang update perkembangan berita - berita terbaru. Sedangkan, Republika.co.id memiliki ideologi nuansa islam yang secara historis dibentuk oleh ICMI. Berdasarkan hal tersebut, Kompas.com serta Republika.co.id memiliki pendekatan yang beraga, saat menyebarkan sebuah artikel, Kompas.com cenderung fokus pada fakta dan informasi tujuan, sementara Republika.co.id cenderung menonjolkan unsur pendapat yang mempersuasif Presiden Jokowi untuk netral dalam Pemilu 2024. Selain itu, kepemilikan media dengan latar belakang yang beragam-ragam. Oleh karena itu, peranan ideologi media tidak lepas dari peranan konten yang nantinya dimuat ke dalam media massa, konten ini tidak bersifat alami melainkan konten yang terpengaruh (Gora & Irwanto, 2015).

Pada konsep konstruksi realitas media, media massa sebagai salah satu pembentuk konstruksi realitas, dimana dapat mengkonstruksi sosial secara cepat dan tersebar merata, karena realitas dibangun untuk membentuk suatu opini publik (Lestari & Iskandar, 2016). Pada kedua portal berita tersebut berusaha menyampaikan informasi yang memberikan gambaran realitas kepada masyarakat. Bahwa kedua portal berita tersebut tentu mempunyai sudut pandang kedua media dalam membingkai berita isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 periode November 2023 hingga Februari 2024. Perbedaan itu dapat didapati pada saat memilih narasumber yang didapati pada penulisan artikel berita. Kompas.com biasanya memuat pemberitaan yang informatif, *cover both side* terkait peristiwa netralitas presiden dalam Pemilu, namun berusaha menyelipkan kritikan kepada Presiden Jokowi dalam masa Pemilu 2024. Sedangkan, Republika.co.id memfokuskan tanggapan yang mengkritik kepada Presiden Jokowi dan judul berita Republika.co.id lebih menekankan persuasif agar Presiden Jokowi netral dalam Pemilu 2024 yang disajikan dengan kata yang lugas dan tegas.

Lalu, jika diamati dari konsep pengaruh media terhadap opini publik, pada kedua media telah menjalankan peran sebagai media guna menjadikan wadah informatif yang memiliki peran penting pada kehidupan bersosial. Menurut Tabroni dalam (Indrawan, 2017, p. 172) menegaskan bahwa opini publik akan terbentuk ketika media massa tersebut mengembangkan isu – isu tertentu, dan opini merupakan diartikan sebagai bentuk ekspresi dari sikap individu terhadap suatu kendala yang dianggap kontroversial. Khususnya mengenai isu netralitas presiden dalam Pemilu 2024 ini memang memberikan dampak pengaruh terhadap khalayak atau pembaca yang setiap individu akan mengartikannya berbeda – beda, sehingga diharapkan bahwa pengaruh media yang dapat membentuk opini publik ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana cara menyikapi peristiwa yang terjadi.